



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa



**Badan Bahasa
Bermartabat
Bermanfaat**

BAHASA DAN SASTRA DALAM GUNTINGAN

Perpustakaan Badan Bahasa

Literasi Sampai Mati

yang lebih substantif. Literasi bukan
untuk mendorong low enforcement
dan social justice. Literasi media dan
teknologi untuk mencapai hegemoni

para pembeli makanan dan meranti
obat-obatan (food gathering), tetapi
bukan kemampuan mereka dalam
aktivitas jorba tersebut juga sangat
gugah bagian dari kualitas literasi
di rumah.

Dengan dibekali kemampuan
literasi yang tidak kalah kualitas de-
ngan Imperium Romanus atau Mesir
Kuno. Untuk menggunakan semua
bukti forensik terkait dengan hal
tersebut, tentu tidak akan pernah
lupa, mengingat bahwa kita dengan

teka dan semangat untuk
hidupkan semangat anak
level 4

Pembina : Sekretaris Badan
Penanggung Jawab : Kepala Subbagian Tata Usaha
Koordinator : Dwi Pudyastuti, S.Pd.
Penyusun : 1. Warsa, S.Pd.
2. Edi Suyanto
Alamat Redaksi : Jalan Daksinapati Barat IV,
Rawamangun
Jakarta Timur 13220
Telepon (021) 4706287/88
Laman : perpustakaan.bahan.bahasa.@kemdikbud.go.id

Akses Pendidikan Tinggi

Arif Satria

Rektor IPB University

PADA 19 Desember 2024 lalu *Metro TV* menggelar diskusi dengan menteri dan para rektor tentang pendidikan. Minimal ada dua isu penting yang dibahas dalam diskusi tersebut, yaitu akses dan kualitas pendidikan. Dua isu itu penting mengingat saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan dan peluang untuk keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah, sekaligus mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Kata kunci untuk menghadapi tantangan tersebut ialah, bagaimana kesiapan kualitas sumber daya manusia (SDM). Apalagi saat ini kita tengah dianugerahi bonus demografi, terlihat dari angka ketergantungan yang mencapai titik terendah 46,9% pada 2030. Artinya, jumlah penduduk usia tidak produktif lebih rendah daripada jumlah penduduk usia produktif. Kita patut bersyukur mengingat kini banyak negara lain yang telah memasuki *aging society*, yaitu penduduk usia lansia semakin meningkat dan bahkan lebih tinggi daripada penduduk usia produktif, seperti Jepang.

Momentum bonus demografi ini harus kita respons dengan peningkatan kualitas SDM, yang salah satu langkahnya ialah dengan meningkatkan akses pendidikan tinggi. Salah satu ukuran akses pendidikan ialah angka partisipasi kasar (APK). APK pendidikan tinggi menunjukkan perbandingan jumlah mahasiswa dengan jumlah penduduk usia 19-23 tahun. Data menunjukkan bahwa APK pendidikan tinggi Indonesia 31,45, yang relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Filipina (35,52%), Malaysia (43%), Thailand (49,29%), Jepang (70%), Singapura (91,09%), dan Korea Selatan (92%). Mengapa APK kita lebih rendah daripada negara-negara lain? Faktor-faktor apa saja penyebab rendahnya APK pendidikan tinggi kita?

Peta lulusan SLTA

Menurut data pemerintah saat ini terdapat 4.356 perguruan tinggi dengan komposisi 92% swasta dan hanya 8% negeri. Jumlah mahasiswa mencapai 9,8 juta orang, jumlah dosen 338,2 orang, dan jumlah program studi 32.592.

Tentu jumlah mahasiswa tersebut akan semakin meningkat bila semakin banyak lulusan SLTA yang melanjutkan studi. Namun faktanya, para lulusan SLTA sebagian besar tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Ada sekitar 3,7 juta pelajar yang baru lulus jenjang SLTA setiap tahunnya, dan hanya 1,8 juta pelajar lulusan SLTA yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Dengan demikian, ada 1,9 juta pelajar yang tidak meneruskan ke perguruan tinggi.

Kalau kita petakan para lulusan SLTA tersebut, setidaknya ada empat tipe. Tipe pertama ialah lulusan SLTA yang memiliki kualitas akademis tinggi dan berasal dari keluarga mampu. Tipe ini tentu tidak bermasalah dan potensial menuntaskan pendidikan di perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.

Tipe kedua ialah lulusan SLTA yang memiliki kualitas akademis tinggi tapi berasal dari keluarga tidak mampu. Di sinilah

program beasiswa menjadi penting untuk membantu kalangan ini. Perhatian banyak pihak ditujukan kepada kalangan ini sehingga beragam beasiswa baik bersumber dari dana pemerintah, organisasi sosial, maupun swasta terus berkembang.

Saat ini berkembang pula program wakaf deposito yang mengundang donator untuk menempatkan dananya dalam periode tertentu, dan hasil penempatan dana tersebut dipergunakan untuk beasiswa. Himpunan Alumni IPB telah mengalang dana melalui mekanisme ini. Begitu pula ICMI, telah memulai usaha yang sama.

Tipe ketiga ialah lulusan SLTA yang memiliki kualitas akademis rendah tapi berasal dari keluarga mampu. Tentu tipe ini relatif tidak bermasalah mengingat mereka masih memiliki modal finansial untuk menentukan langkah selanjutnya, baik berwirausaha maupun melanjutkan studi.

Tipe keempat ialah lulusan SLTA yang memiliki kualitas akademis relatif rendah dan juga berasal dari keluarga tidak mampu. Diduga sebagian besar dari 1,9 juta pelajar yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi berasal dari tipe ini. Tipe inilah yang kini mestinya mendapat perhatian khusus mengingat mereka akan dihadapkan pada masalah kesulitan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.

Mereka memiliki keterbatasan keterampilan yang diperlukan dunia kerja. Bila tidak tertangani dengan baik, ancaman pengangguran akan semakin meningkat dan pada akhirnya berpotensi menjadi beban pembangunan. Terhadap kelompok ini diperlukan intervensi khusus.

Faktor-faktor

Rendahnya APK pendidikan tinggi di Indonesia diduga disebabkan sejumlah faktor. Pertama, keterbatasan akses baik secara geografis maupun infrastruktur. Banyak daerah terpencil di Indonesia sulit dijangkau yang juga menyulitkan siswa di daerah tersebut untuk melanjutkan studi karena keterbatasan sarana dan prasarana transportasi. Begitu pula fasilitas pendidikan yang kurang merata membuat siswa kesulitan untuk kuliah.

Kedua, isu kualitas pendidikan menengah. Tidak semua pendidikan SLTA memiliki kualitas yang tinggi. Kualitas SLTA yang rendah bisa berdampak pada rendahnya kualitas lulusannya. Termasuk di dalamnya ialah rendahnya minat siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi.

Ketiga, tingginya biaya pendidikan di perguruan tinggi. Di satu sisi perguruan tinggi menetapkan biaya pendidikan yang relatif tinggi dan di sisi lain jumlah beasiswa juga terbatas. Tentu situasi ini berbeda dengan kondisi di Jerman yang membebaskan biaya kuliah untuk mahasiswa.

Keempat, faktor sosiologis. Masih banyak persepsi di kalangan masyarakat menengah ke bawah bahwa meneruskan studi ke pendidikan tinggi tidak penting. Apa-

lagi bagi kaum perempuan yang di sebagian kelompok masyarakat dipersepsikan sebagai orang yang hanya berperan dalam urusan domestik rumah tangga, sehingga dianggap tidak terlalu penting untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Selain itu, rendahnya cita-cita siswa untuk masa depan berpengaruh terhadap motivasi untuk melanjutkan studi setingginya.

Rendahnya APK pendidikan tinggi ini tentu bisa berdampak kepada kualitas SDM kita mendatang. Kondisi bonus demografi yang kita alami saat ini tentu tidak akan berarti apa-apa kalau kualitas SDM kita terbatas. Dominasi SDM usia produktif dengan kualitas rendah akan bisa berdampak pada peningkatan pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap daya saing bangsa.

Strategi

Upaya peningkatan APK pendidikan tinggi perlu dilakukan secara komprehensif. Setidaknya ada lima strategi yang diperlukan. Pertama, pengembangan universitas digital yang memiliki fleksibilitas dalam waktu dan tempat. Hanya universitas digital yang mampu menjangkau jumlah mahasiswa dalam skala besar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur digital sehingga dapat diakses pelosok Nusantara.

Kedua, pengembangan akademi komunitas diploma 1 dan 2. Strategi ini penting bagi lulusan SLTA tipe 4 di atas, di mana mereka memerlukan pendidikan vokasi satu hingga dua tahun sehingga bisa langsung kerja. Dalam hal ini perusahaan swasta dapat menjadi motor pemgerak akademi komunitas yang program pendidikannya disesuaikan dengan kebutuhan kualifikasi tenaga kerja di perusahaannya. Sebagai contoh, perusahaan sawit bisa menyelenggarakan program ini dengan menyediakan beasiswa penuh bagi mahasiswanya. Setelah lulus, mereka bisa bekerja di perusahaan tersebut. Di sinilah kemitraan swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah diperlukan. Perusahaan-perusahaan besar perlu mengembangkan program ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan.

Ketiga, peningkatan jumlah beasiswa, yang berasal tidak saja dari pemerintah, tetapi juga dari swasta dan masyarakat luas. Yayasan Alumni Peduli IPB (YAPI) menggelar konser amal yang ternyata dalam 2 jam bisa mendapatkan hampir Rp3 miliar untuk beasiswa. PGA IPB setiap tahun menggelar *charity tournament* untuk mengumpulkan dana beasiswa. Kini *crowd funding* juga menjadi bentuk baru penggalangan dana untuk beasiswa.

Keempat, peningkatan kualitas pendidikan menengah. Masa depan perguruan tinggi ditentukan oleh kualitas pendidikan menengah, baik kurikulum, fasilitas, maupun tenaga guru. Hal ini karena input bagi perguruan tinggi berasal *output* SLTA. Oleh karena itu, minimal pendidikan menengah membekali siswanya dengan pola pikir baru tentang pentingnya memasuki dunia pendidikan tinggi.

Kelima, penetapan wajib belajar 12 tahun. Untuk memastikan bahwa semakin banyak lulusan SLTA masuk ke perguruan tinggi, kita juga perlu memastikan semakin banyaknya lulusan SLTP yang masuk SLTA. Oleh sebab itu, penetapan wajib belajar 12 tahun harus segera diwujudkan untuk menggantikan wajib belajar 9 tahun.

Ini merupakan upaya tidak langsung peningkatan APK pendidikan tinggi, tapi sangat diperlukan. Sekaligus ini menggambarkan bahwa APK pendidikan tinggi berhubungan dengan proses pendidikan sebelumnya sehingga kebijakan pendidikan nasional harus holistik lintas jenjang.

Kelima strategi di atas masih bisa dilengkapi dengan strategi lainnya, baik jangka pendek maupun panjang. Namun, tetap yang perlu dicatat ialah bahwa memberi akses pendidikan tinggi seluas-luasnya merupakan cara terbaik mengatasi kemiskinan.

Guru Berdaya



DOK. PRIBADI

Victor Yasadhana

Direktur Kerja Sama
Antarlembaga Yayasan Sukma

“A *Sa classroom community, our capacity to generate excitement is deeply affected by our interest in one another, in hearing one another's voices, in recognizing one another's presence.”* bell hooks (1994).

Bersekolah sejak lama dipercaya sebagai salah satu jawaban atas persoalan ketimpangan. Bersekolah dianggap membuat seseorang semakin terdidik dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki status sosial-ekonomi mereka.

Bersekolah juga dipercaya sebagai jalan untuk ‘menjadi manusia yang lebih baik’ dengan memahami, menghormati, dan mempraktikkan nilai-nilai luhur yang dipercaya akan diperlukan dalam kehidupan. Bersekolah ialah cara untuk lebih berdaya dengan cara memanusiakan manusia. Namun, pada kenyataannya, bersekolah juga menjadi muasal stratifikasi sosial dan berbagai persoalan yang rumit yang tidak manusiawi.

Sistem dan pengelolaan pendidikan masih diwarnai dengan berbagai praktik yang justru tidak memanusiakan dan memberdayakan mereka yang belajar. Guru dan murid harus menghadapi berbagai belenggu yang menjauhkan mereka dari kesempatan untuk menjadi manusia seutuhnya dan memaksimalkan potensi mereka.

Belenggu kurikulum memaksa murid untuk hanya mengutamakan capaian-capaian akademik melalui serangkaian tes yang cenderung seragam, menumpulkan kepekaan mereka terhadap persoalan nyata di sekitar mereka, dan mengesampingkan banyak aspek nonkognitif sebagai manusia. Belenggu yang sama juga memaksa guru terus

berkutat dengan target ketuntasan dan berbagai beban administratif yang justru menjauhkan peluang mereka untuk mencapai potensi maksimal mereka.

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, setidaknya berbagai upaya perbaikan telah dilakukan. Semangat untuk memberi ruang untuk bermanuver bagi guru dan murid telah dimulai dan diupayakan. Ide dan praktik Kurikulum Merdeka, misalnya, terlepas dari berbagai kritik atas kelemahannya, diinisiasi dengan niatan memberi ruang kebebasan bagi guru dan murid untuk memilih minat, fleksibilitas dalam proses belajar mengajar, orientasi pada kerja sama, menumbuhkan etika, dan membangun karakter.

Meskipun dalam penerapannya, berbagai kritik, baik dalam tataran konsep maupun filosofi, hingga (terutama) praktik pelaksanaan masih terus muncul, Kurikulum Merdeka memberi ruang bagi optimisme dan kepercayaan melalui semangat bahwa guru dan murid (seharusnya) merupakan subjek yang aktif dalam proses pembelajaran; sebuah penghargaan terhadap kodrat kemanusiaan.

Tentu saja masih perlu dibuktikan lebih lanjut apakah skenario pendidikan dengan Kurikulum Merdeka itu akan menyemai peluang bagi mereka yang belajar untuk lebih berdaya sebagai manusia.

Salah satu hal yang perlu dipikirkan dalam upaya menjadikan bersekolah menjadi sebuah proses belajar yang memberdayakan ialah perubahan cara pandang dan kualitas guru. Guru ialah elemen penting dalam kerangka pendidikan yang memberdayakan. Guru perlu memahami bahwa kehadiran mereka dalam proses belajar merupakan kunci untuk memastikan murid dan diri mereka sendiri menjadi berdaya.

Engaged pedagogy

Dalam pendekatan *engaged pedagogy*, misalnya, Bell Hooks—salah satu tokoh penting dalam pendekatan ini—menyatakan lima hal penting terkait dengan proses belajar yang perlu diperhatikan guru (Hooks: 1994).

Pertama, proses mengajar seharusnya ialah aktivitas yang menumbuhkan semangat belajar dan kegembiraan. Murid diperlakukan bukan sebagai objek yang hadir untuk mengonsumsi pengetahuan

secara pasif, melainkan sebagai individu yang berharga dan perlu untuk turut berpartisipasi aktif dalam proses belajar.

Guru membangun hubungan yang baik dengan murid dan bukannya hanya menjejali mereka dengan pengetahuan. Itu disebabkan saat murid turut terlibat dalam proses belajar, mereka akan menemukan kegembiraan dalam belajar, situasi yang memungkinkan pertumbuhan intelektual dan spiritual. Kontribusi mereka dalam proses belajar dapat menjadi sumber pembelajaran dan modal terbentuknya komunitas belajar.

Kedua, guru harus tampil menjadi manusia yang utuh karena mereka ialah panutan yang menjadi muas contoh baik. Bukan hanya terkait dengan kapasitas keilmuan, melainkan juga dalam bersikap; pribadi yang sama dalam ucapan dan tindakan. Bahkan di luar konteks kelas dan sekolah.

Ketiga, proses belajar harus menjadi praktik pembebasan. Proses belajar bukan hanya sekadar proses transfer ilmu, melainkan juga kesempatan untuk menciptakan ‘tempat netral dan aman’ yang mana semua orang terlibat, berefleksi, mengubah cara berpikir dan sikap mereka. Guru harus memastikan keterlibatan murid dalam proses belajar.

Pendapat yang lahir dari pengalaman dan dibagikan melalui diskusi kolektif menjadi dasar bagi pemikiran kritis, refleksi, dan perubahan positif.

Keempat, proses belajar harus menjadi sarana bagi murid untuk mencapai potensi maksimal mereka. Guru dituntut untuk melepaskan pola pikir tradisional yang hanya berfokus pada mengajar yang mana guru dianggap sebagai satu-satunya pemegang otoritas ilmu. Pandangan seperti itu mengabaikan keberanian murid dalam menyampaikan pendapat dan menegakkan asumsi bahwa mereka tidak berkontribusi dalam pembelajaran. Sebaliknya, guru harus berperan sebagai pembelajar sejati yang percaya bahwa kese-



tuhan fisik dan emosi akan memengaruhi cara seseorang memperlakukan orang lain. Kesadaran akan kebutuhan fisik dan emosi diri akan membantu guru memilih dan menentukan cara yang paling tepat dalam memperlakukan murid.

Dengan memahami dan mempraktikkan kelima hal tersebut, proses belajar mengajar akan memberi penekanan pada pentingnya menumbuhkan kolaborasi, memastikan kapasitas intelektual dan spiritual yang bertumbuh, serta hubungan guru-murid yang lebih bermakna. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk memastikan proses belajar yang memberdayakan?

Sekolah yang belajar

Mewujudkan proses belajar sebagai laku pemberdayaan jelas memerlukan dukungan yang serius dan konstan bagi guru. Hanya dengan menyemai dan menumbuhkan budaya belajar dalam entitas sekolah, dukungan yang diperlukan dapat disediakan.

Sekolah perlu mengambil posisi sebagai organisasi yang memungkinkan seluruh anggotanya memiliki keinginan belajar dan bertransformasi secara terus-menerus sesuai dengan tantangan perubahan yang dihadapi. Adaptasi terhadap berbagai perubahan membutuhkan keluwesan yang memungkinkan sekolah tidak gagap dan menikmati perubahan sebagai bagian dari peneguhan keinginan meraih potensi maksimal bagi seluruh entitas atau setiap pribadi di dalamnya.

Jika sekolah hanya menjalankan fungsi tradisional sebagai tempat para murid dan guru mencari pengetahuan dan mengajar, berorientasi pada capaian kognitif semata, menegakkan disiplin yang membabibuta dan tidak menyadari peluang bahwa semua orang bisa saling belajar, sesungguhnya sekolah sedang menggerus kemungkinan belajar untuk berdaya menjadi tiada.

hatian untuk belajar dari murid selalu terbuka.

Kelima, guru perlu memahami

dirinya, apa yang diinginkan, secara fisik maupun emosional.

Memisahkan begitu saja kebu-

DAUTA

Pendidikan Nonformal Bangun Bangsa Hebat

MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan bahwa untuk membangun bangsa yang maju, hebat, dan memberikan layanan pendidikan bermutu bagi semua, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan jalur pendidikan formal, tapi juga harus memperkuat pendidikan nonformal.

"Acara Gelar Hasil Karya Peserta Didik Kursus dan Pelatihan 2024 ini menjadi komitmen kami pada masa yang akan datang terkait dengan peran penting lembaga pendidikan nonformal, kursus, dan pelatihan," ungkapnya dalam acara Gelar Hasil Karya Peserta Didik Kursus dan Pelatihan 2024, kemarin.

Lebih lanjut Abdul Mu'ti menambahkan bahwa pihaknya sudah bertemu dengan penyelenggara kursus dan pelatihan dari seluruh Indonesia. Ada berbagai macam kursus yang diselenggarakan dan capaian yang sangat bermakna bagi putra-putri Indonesia untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan. "Tentu saja keterampilan itu diperlukan dalam rangka memberikan kesempatan kepada anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan kesempatan memperoleh rezeki melalui profesi yang mereka miliki," kata Abdul Mu'ti.

Mendikdasmen beberapa kali juga menyampaikan agar para siswa SMK tidak hanya lulus memiliki ijazah, tapi juga dimungkinkan mereka memiliki berbagai sertifikat profesi yang menunjukkan kompetensi mereka pada bidang keahlian tertentu. "Kemitraan vokasi tidak hanya dengan industri besar, tapi juga bisa dengan industri kecil bahkan lembaga kursus dan pelatihan. Mereka yang mengambil program keahlian tata boga, misalnya, bisa berpraktik di restoran atau kafe yang membuat mereka tesertifikasi dari keahlian mereka," jelas Abdul Mu'ti.

Dalam kesempatan yang sama, Plt Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikdasmen, Tatang Mutaqqin, menambahkan bahwa *event* tersebut terdiri atas gelar karya pameran hasil karya dari 20 lembaga kursus dan pelatihan yang menjadi perwakilan dari LKP penyelenggara kursus dan pelatihan dalam tujuh segmen. Mulai teknik, kecantikan, koleksi mode, terapi sehat, bahkan industri perhotelan.

"Selanjutnya ada juga gelar karya teatrikal yang merupakan penampilan oleh peserta didik serta alumni kursus dan pelatihan yang menggambarkan kompetensi sesuai dengan keterampilan masing-masing yang mana keterampilan tersebut sangat bermanfaat untuk bekal mereka merintis usaha dan agar terserap di dunia kerja. Selain itu, akan diselenggarakan juga bincang kursus yang dibagi menjadi dua segmen dan diakhiri dengan pemberian penghargaan kursus dan pelatihan tahun 2024," tandas Tatang. (Des/S-1)

Membaca Indonesia Melalui Naskah Kuno

PENGANTAR

MULAI 9 Maret 2022, tulisan di halaman Opini yang terbit setiap Rabu merupakan sinergi antara *Media Indonesia* dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang menyajikan artikel opini dari para intelektual dan aktivis Muhammadiyah dengan berbagai latar belakang keilmuan dan profesi. Persyarikatan Muhammadiyah yang didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta, pada 18 November 1912 merupakan gerakan Islam, dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dan tajdid yang bersumber pada Quran dan *as-sunnah*. Sinergi ini merupakan bentuk peran media dalam mendukung terwujudnya gerakan pencerahan menuju Indonesia berkembang, melalui pembangunan tata sosial, dan pendidikan masyarakat yang lebih baik.



DOK PRIBADI

Yulianti Muthmainnah

Penerima Beasiswa Pendidikan Kader Ulama (PKU) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Mahasiswi Program Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Institut Ilmu Qur'an, Dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta, Pengurus Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah

PARA Presiden Indonesia, dari Soekarno hingga Joko Widodo, pada umumnya menurunkan 'bakat politik' kepada anak dan/atau menantunya. Fakta ini mengingatkan kita pada *Babad Tanah Jawa*, *Babad Banyumas Mertadiredjan*, yang mengisahkan seorang raja menurunkan kekuasaan kerajaannya kepada putranya.

Babad Banyumas Mertadiredjan ditulis sekitar tahun 1816-1830, kala pemerintahan Adipati Mertadiredja I. Babad dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah kisah berbahasa Jawa, Sunda, Bali, Sasak, dan Madura yang berisi peristiwa sejarah, cerita sejarah, riwayat, sejarah, tambo, hikayat: Tanah Jawa. Beberapa contoh babad ialah *Babad Cirebon*, *Babad Banten*, *Babad Giyanti*, *Babad Tanah Jawi*, *Babad Diponegoro*, dan *Babad Blambangan* (Jusuf Jamsari, 1982).

Pasal 4 Undang-Undang No 43/2007 menjelaskan naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Babad termasuk naskah kuno karena ditulis dengan tulisan tangan.

Naskah kuno disebut juga manuskrip. Merujuk pada data Chambert-Loir dan Oman Fathurahman, setidaknya Indonesia memiliki 58.947 naskah kuno Nusantara yang tersebar di museum, perpustakaan, bahkan koleksi individu di dalam dan luar negeri. Tidak kurang dari 500 naskah kuno Indonesia tersimpan di British Library, menurut pengakuan Anabel Teh Gallop.

Naskah kuno Indonesia membahas banyak hal. Seputar politik kepemimpinan, astronomi, obat-obatan, dan pembagian kekuasaan termuat dalam naskah-naskah kuno seperti *Sanghyang Siksa Kandang Karesian*, *Fragmen Carita Parahiyangan*, *Amanat Galunggung*, *Sanghyang Raga Dewata*, *Sanghyang Hayu*, maupun *Sewaka Darma*.

Upaya mencegah gizi buruk (*stunting*) telah ada dalam naskah kuno *Sanghyang Titisjati Pralina*. Adapun *Kawih Katanian* menarasikan ragam model padi di daerah Sunda pada masa lalu, atau yang terkenal dengan *tatanén* 'pertanian' (Elis Suryani NS, 2021).

Lebih lanjut, Fathurahman mengatakan naskah kuno diklasifikasikan menjadi 20 kelompok bahasa, yakni Aceh, Arab, Bali, Batak, Belanda, Bugis-Makassar-Mandar, Jawa dan Jawa Kuno, Madura, Melayu, Minangkabau, Sanskerta, Sasak, Sunda dan Sunda Kuno, Ternate, Wolio. Ada pula bahasa minoritas, seperti yang ada di bagian Indonesia Timur, Kalimantan, dan Sumatra Selatan.

Tingginya jumlah naskah kuno dan ragam bahasa yang dituliskan menunjukkan peradaban Indonesia demikian maju, orang-orang Indonesia dahulu sungguh cerdas dan berpikir berkemajuan, sehingga menuliskan pemikiran dan sejarah para raja mereka melalui tulis tangan.

Naskah kuno Indonesia jauh lebih banyak daripada milik Tiongkok, Jepang, dan negara lainnya. Itu sebabnya, Wardiman Djojonegoro mendorong pemerintah Indonesia segera mengajukan register IKON untuk naskah kuno yang dimiliki agar dicatatkan dalam Memori Ingatan Dunia atau Memory of the World (MoW) sebagai warisan peradaban yang berharga.

Tafsir naskah kuno ulama Nusantara

Kaya akan ragam naskah kuno, paling tidak Indonesia memiliki tiga jenis naskah kuno, yaitu manuskrip Islam (berbahasa dan bertuliskan Arab), manuskrip Jawi (bertuliskan huruf Arab tapi berbahasa Melayu, diberi tambahan vonim menyesuaikan aksan Melayu), dan manuskrip Pegon (bertuliskan huruf Arab tapi menggunakan bahasa lokal Jawa, Sunda, Bugis, Buton, Banjar, Aceh, dan lainnya).

Contoh naskah kuno yang berhuruf Arab berbahasa Melayu, antara lain *Sejarah Melayu*, *Sejarah Aceh*, *Sejarah Raja-Raja Banjar dan Kota Waringin*, *Asal Raja-Raja Sambas*, *Silsilah Pagaruyung*, *Syair Inggris Menyerang Kota*, dan *Syair Perang Banjarmasin* (Jusuf Jamsari, 1982).

Mahrus El-Mawa (2016) menarasikan naskah kuno yang bertuliskan Arab Pegon memiliki hubungan yang sangat erat dengan kelahiran ulama-ulama Nusantara. Sebagian besar kisah mereka tertulis dalam naskah kuno. Demikian pula karya tafsir mereka dituliskan menggunakan Arab Pegon.

Tulisan Arab Pegon, kala itu, untuk mempermudah penyebaran agama Islam karena masyarakat memahami bahasa Jawa dengan baik, baik tulis maupun lisan. Tulisan Pegon memiliki tiga fungsi. Pertama, sarana penulisan teks keagamaan seperti tata cara bacaan salat dan doa-doa.

Kedua, sarana penulisan teks sastra. Contohnya sastra bernuansa keislaman seperti *Serat Ahmad Muhammad*, *Serat Anbiya*, *Serat Yusup*, bernuansa sejarah *Babad Banten*, *Babad Demak*.

Ketiga, sarana penulisan surat, yakni sebagai sarana komunikasi pribadi atau kerajaan. Misalnya surat Bagus Ngarpam kepada raja pada 23 Ramadan 1770, serta sarana penulisan teks mantra, raja, teks primbon, dan obat-obatan (Titik Pudjiastuti, 2009).

Adapun contoh karya ulama Nusantara yang ditulis dengan menggunakan Arab Pegon dalam bidang keagamaan ialah karya Syekh Hamzah al-Fansuri, Syekh Syamsuddin Al-Sumatrani, Syekh Nuruddin ibnu Ali ibnu Hasanji ibnu Muham-

mad Hamid, Abdul Rauf Singkel, Muhammad Arsyad al-Jawi al-Banjari, Sayyid Utsman ibnu Abdullah al-'Alawi, Daud ibnu'Abdullah ibnu Idris al-Fatani, Abdul Shamad al-Jawi al-Falimbani, Ahmad al-Qasyasyi, Muhammad Zain ibnu Jamaluddin al-Asyi, Sirajuddin ibnu Jalaluddin, Tajuddin Abu al-Fadl Ahmad ibnu, Muhammad ibnu Abdul Karim ibnu 'Atha' l'lah, Kemas Fakhruddin, Yusuf at-Taj al-Makani, dan Ahmad ibnu Muhammad ibnu al-Marhum Husain al-'Idrus (A Nashan Abhimata dan Didik Purwanto, 2022).

Naskah kuno Kitab Shirathal Mustaqim

Mahrus el Mawa (dosen IIQ Jakarta) dalam diskusi terfokus di Jakarta (Sabtu, 19 Oktober 2024) mengatakan setidaknya seseorang yang hendak mengkaji naskah kuno, sekurang-kurangnya pernah memegang kertas asli dari naskah kuno tersebut. Terdorong rasa keingintahuan itu, maka saya mendatangi Perpustakaan Nasional (Perpusnas) di Jakarta Pusat pada 19 November 2024 dan berkesempatan meminjam koleksi naskah kuno milik Perpusnas.

Sebelum dapat meminjam naskah kuno tersebut, oleh petugas Perpusnas saya diminta membersihkan tangan lalu diberikan bantal kecil, dan diajarkan cara membuka naskah. Saat itu saya merasa deg-degan mendengarkan instruksi dan tata cara membaca naskah kuno.

Saya meminjam *Kitab Shirathal Mustaqim* karya Syekh Nuruddin ibnu Ali ibnu Hasanji ibnu Muhammad Hamid. Merujuk pada cara kerja filologi, kajian naskah kuno, maka salah satu naskah kuno yang penting kita teliti ialah naskah teks-teks tafsir Al-Qur'an. Kegiatan meneliti ini disebut proses *tahqiq* kitab, bertujuan memelihara keaslian teks, menyelamatkan karya-karya ulama masa lalu.

Adapun orang yang melakukan kegiatan *tahqiq* atau mengkaji atau meneliti disebut *muhaiqqiq*. Menurut Kamilin Jamilin (ahli Majlis Fatwa Wilayah Persekutuan, Malaysia) yang terlibat dalam kegiatan *tahqiq*, tahapan untuk membaca naskah kuno diawali dengan menelaah

judul kitab,
memastikan
kondisi naskah,
nama pengarang
dan latar belakang
penulis, sandaran kitab
dan kebenarannya, serta isi
kitab (matan).

Saya pun mengamati *Kitab Shirathal Mustaqim* dengan nomor panggil ML 104 di Perpustakaan. Kitab ini ditulis dalam bahasa Melayu dan beraksara Arab (Jawi). Kitab ini ditulis di atas kertas Eropa, tanpa *watermark*. Sebagian besar kertas masih bisa dibaca dengan jelas, walaupun sudah ada halaman yang terkoyak atau sobek sehingga ada bagian yang tidak bisa dibaca atau tulisan seperti agak luntur di beberapa lembar kertas.

Bila ada halaman yang telah sobek, bagian ujungnya diberi lapisan kertas minyak atau seperti dilapisi plastik, tapi bukan dilaminating memenuhi seluruh halaman sehingga halaman menjadi kaku. Setiap halaman dijilid dengan karton bersampul kertas marmer cokelat muda. Namun, bila kertas kitab masih utuh, tidak robek, maka lapisan jilid seperti plastik atau kertas minyak itu menutupi seluruh tulisan saja, tetapi menyisakan sekitar 4 cm di bagian pinggir kiri dan kanan kertas. Dengan begitu, saya masih bisa merasakan tekstur kertas Eropa asli tersebut.

Kitab ini ditulis tangan dengan menggunakan tinta hitam dan merah. Pada bagian yang dianggap penting diberi tinta merah. Tidak ada hiasan pada setiap pinggir halaman dari kirab ini. Tulisannya sangat rapi, seolah-olah ditulis dalam kolom yang sudah disiapkan atau digaris kanan-kiri atas bawah, benar-benar rapi, tidak ada tulisan yang keluar dari kotak khayal (maksud saya, teramat rapi, saya bayangkan seperti ada garis khayal yang menuntun penulis kitab ini sehingga tidak keluar dari kotak garis ketika menuliskan kitab). Walaupun kertas Eropa ini bukan kertas bergaris yang memungkinkan kita menulis dengan rapi seperti ada garis-garis dalam buku tulis, sebagaimana buku tulis yang mudah kita dapatkan di berbagai tempat saat ini. Bila diukur, tulisan tangan berada tepat di tengah-tengah buku kitab dengan ukuran kertas tersisa (kosong dari tulisan), 4 cm di bagian kanan-kiri dan bawah, atas tersisa 3 cm di bagian atas. Sedangkan di bagian tengah, posisi kitab terbuka, maka kertas kosong tengahnya hanya berjara. 2 cm kanan-kiri.

Kitab ini berukuran 21 x 15 cm, setebal 408 halaman, setiap halaman terdiri dari 19 baris tulisan, dan jumlah tulisan dalam baris ini konsisten pada setiap lembar halaman. Adapun penomoran naskah tambahan dilakukan orang lain, dengan pensil, dengan sistem ganda, angka Arab 1-201.

Kitab ini tercatat dalam Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara, jilid 4, pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Juga tercatat dalam Katalogus van Ronkel (1909:375), Katalog Koleksi Naskah Melayu Museum Pusat Dep P&K, serta tercatat dalam Malay Manuscripts (Howard, 1966:63), dan Katalog Naskah Melayu (ML), disusun oleh Yeri Nurita, dkk, Perpustakaan Nasional RI, 2019. Naskah kuno ini pun telah dialihmediakan dalam bentuk mikrofilm dengan nomor rol 402.05 (dan MF 48.03, 85.01).

Isi kitab menurut Abhimata dan Purwanto (2022) membahas sendi-sendi beribadah dan syariat agama Islam. Isinya terdiri atas beberapa kitab, pasal, dan bab. Pembahasan pertama dimulai dengan kitab *thaharah* (bersuci), yaitu dengan menjelaskan macam-macam air yang boleh digunakan wudu dan mandi hadas. Dilanjutkan dengan membahas salat, seperti keterangan waktu salat, rukun dan syarat salat, sunah yang dikerjakan di dalam salat, salat sunat seperti salat Id, kusufain, istisqa, dan lain-lain. Berikutnya masalah zakat, puasa, haji, dan kurban. Keterangan-nya dilengkapi dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi.

Menjaga keluhuran budaya bangsa

Saya ingat betul ketika pandemi covid-19 saat semua belajar dan bekerja dari rumah. Otomatis sebagai orang tua, kami merangkap guru SD, karena anak-anak masih duduk di bangku SD. Saat itu anak-anak mendapatkan tugas menuliskan $2 \times 4 = 8$ dalam bentuk penjumlahan. Saya pun mengajarkan anak-anak, sebagaimana ingatan kala saya SD dahulu, bahwa 2-nya bisa 4 kali atau 4-nya bisa dua kali dalam bentuk penjumlahan, yakni $2 + 2 + 2 + 2 = 8$ atau $4 + 4 = 8$. Tetapi jawaban saya ini disalahkan oleh guru mereka. Intinya $2 \times 4 = 4 + 4$, sebagai penjumlahan berulang-nya dari 2×4 . Saya tidak habis pikir, kenapa $2 + 2 + 2 + 2 = 8$ menjadi salah? Padahal hasil jumlahnya sama-sama 8?

Bukan itu saja, pada pelajaran olahraga, gerak motorik nonmotorik menjadi sama dan berulang. Pelajaran PPKn, yang saya dengar melalui Zoom, guru memberikan contoh pengamalan sila-sila Pancasila berulang dan nyaris sama persis untuk kelas 1 dan kelas 4 SD. Termasuk seni rupa, sama juga penjelasan tiga, dua, satu dimensi.

Lalu setahun kemudian, ketika anak-anak naik ke kelas 2 dan 5 selama covid-19. Pelajaran di atas sama persis, tidak berubah. Ketika itu saya bergumam dalam hati, "Ini kurikulumnya yang tak jelas atau guru yang tak kreatif memberikan penjelasan, ya." Intinya, anak-anak seperti belajar berulang-ulang materi-materi pelajaran kelas 1 ke 2 SD atau kelas 4 ke 5 SD.

Presiden Prabowo Subianto telah membentuk tiga kementerian; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), serta Kementerian Kebudayaan. Harapannya itu menjadi ekosistem sains, pendidikan, dan teknologi di Indonesia yang lebih terarah.

Untuk itu, kiranya pemerintah penting mengkaji ulang silabus SD. Tampaknya, anak-anak perlu diperkenalkan khazanah kekayaan naskah kuno yang dimiliki Indonesia dan para ulama Nusantara kita, daripada keberulangan pelajaran yang saya juga tidak memahami apa dampak dari terus berulangnya pelajaran dari kelas 1 sampai 4 (dan mungkin 6) SD.

Membaca naskah kuno itu seperti kita sedang melihat cermin, terutama pada saat perpolitikan kita saat ini. Sangat mirip dengan perpolitikan pada masa lalu yang tertulis dalam naskah kuno atau babad Nusantara dan semacamnya. Karena itu, penting bagi kita menjaga, mengenalkan naskah-naskah tersebut agar kelak sampai pada anak cucu.

Menjaga kelestarian naskah kuno bagian dari menjaga keluhuran budaya bangsa dan agama, salah satunya melalui kurikulum yang mulai dikenalkan pada anak-anak kita ketimbang kurikulum pelajaran yang terus berulang mulai SD kelas 1 sampai kelas 6. Kurikulum harusnya berjenjang, naik, bukan berulang, jadi anak-anak tidak bosan dan menumbuhkan minat baca mereka. Semoga.

Anugerah Cerpen "Kompas" Berlanjut

Harian "Kompas" akan mengumumkan Cerpen Terbaik "Kompas" 2023 hari ini.

JAKARTA, KOMPAS — Harian *Kompas* akan menggelar Malam Anugerah Cerpen *Kompas* di Bentara Budaya Jakarta, Jakarta Pusat, pada hari ini, Jumat (20/12/2024). Pergelaran acara ini merupakan wujud komitmen *Kompas* dalam merawat dan memperkuat sastra Indonesia.

Sastra, khususnya cerpen, telah menjadi bagian dari sejarah perjalanan *Kompas*. Pada 4 Februari 1967, *Kompas* sudah menerbitkan ulang cerita yang pernah tayang di majalah *Praba* berjudul "Lajang Saka: Saidjah". Ini merupakan embrio ruang sastra di *Kompas*.

Kehadiran Cerpen Pilihan *Kompas* menjadi wujud komitmen merawat sastra Indonesia. Buku Cerpen Pilihan *Kompas* pertama terbit pada 1992 dengan judul *Kado Istimewa*. Setelah itu, Malam Anugerah Cerpen *Kompas* mulai digelar hingga kini.

"*Kompas* berusaha semaksimal mungkin untuk memberi apresiasi kepada cerpenis-cerpenis ini karena sayangnya geliat sastra masih minim apresiasi. Harapannya, bisa menumbuhkan semangat penulis untuk menghasilkan karya terbaik," tutur Pemimpin Redaksi Harian *Kompas* Sutta Dharmasaputra di Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Sastra, ujar Sutta, sangat berbeda dengan produk jurnalistik. Sastra kerap bersifat fiksi, sedangkan berita menekankan pada fakta. Akan tetapi, sastra justru bisa membangun imajinasi yang mendahului fakta saat ini.

"Karya tulis yang bersifat fiksi dan nonfiksi mesti saling mengisi, bergandengan bersama, meski dunia mereka berbeda. Ada hal-hal yang membangun harapan dan

mimpi bisa diwujudkan karya-karya sastra yang bersifat fiksi. Negara yang maju itu justru sastranya hebat-hebat," katanya.

Sutta berharap apresiasi *Kompas* terhadap karya sastra dapat menggugah pengambil kebijakan atau orang yang menghargai sastra. "Semoga apa yang *Kompas* lakukan ditiru dan didukung sehingga sastrawan bisa mendapat penghargaan yang jauh lebih baik," ucapnya.

Seleksi cerpen

Sepanjang 2023, harian *Kompas* menerima 3.824 cerpen. Sebanyak 49 cerpen dimuat di koran dan 104 lainnya di platform *Kompas.id*. Tim juri menyeleksi puluhan cerpen tersebut untuk menentukan pemenang.

Tim juri Anugerah Cerpen *Kompas* terdiri dari awak Redaksi *Kompas*. Mereka adalah Hilmi Faiq (Wakil Kepala Desk Budaya sekaligus sebagai ketua tim juri), Andreas Mar-yoto (Wakil Redaktur Pelaksana), Budi Suwarna (Kepala Desk Budaya), Sarie Febriane (Wakil Kepala Desk Jurnalisme Data dan Investigasi), serta Susy Berindra (Wakil Kepala Desk Regional).

Budi Suwarna, yang juga merangkap Ketua Panitia Anugerah Cerpen *Kompas*, menyampaikan, cerpen-cerpen tersebut mengalami proses kurasi berlapis. Dari 49 cerpen tersebut, juri memilih 20 nomine cerpen terbaik.

Setiap juri mempunyai satu suara untuk menentukan cerpen terbaik. Setelah juri memberikan suara, cerpen-cerpen tersebut kembali diperiksa dari segi estetika, teknik, kekuatan isu, dan kebaruan. Juri kemudian berdiskusi untuk menentukan pemenang tunggal. "Yang menarik, juri

mencapai suara bulat untuk memilih satu cerpen sebagai pemenang," ujar Budi.

Realisme sosial

Proses seleksi cerpen *Kompas* kali ini kembali menunjukkan tema besar yang muncul dari pemikiran para penulis. Sama seperti tahun 2022, cerpen yang terbit pada 2023 masih menggunakan gaya realisme sosial yang juga menjadi kekhasan cerpen koran.

Tema yang muncul dalam cerpen-cerpen kali ini relatif beragam dan relevan. Isu-isu yang kerap muncul tetap ada, seperti kekerasan terhadap perempuan, kerusakan lingkungan, korupsi, dan kematian.

Hilmi Faiq mengatakan, isu-isu yang sering muncul dalam cerpen menunjukkan bahwa isu tersebut di dunia nyata tidak pernah surut. "Maka, menjadi penting untuk menceritakannya kembali, terus dan berulang kali, guna menjaga kewarasan kita bahwa masih banyak hal yang menjadi pekerjaan bersama," katanya.

Akan tetapi, Budi menambahkan, mulai ada perubahan isu yang muncul. Isu kematian banyak bermunculan di cerpen, terutama setelah terjadi pandemi Covid-19. Tafsir makna kematian dilihat dalam berbagai perspektif, termasuk sebagai tragedi yang indah. Namun, belakangan kisah tentang kematian berkurang.

"Pembahasan isu makin beragam. Cerpenis selama beberapa tahun terakhir mulai banyak bicara soal konsekuensi teknologi di kehidupan manusia. Cerpen *Kompas* memang cenderung menangkap fenomena sosial," ujarnya.

(LSA)

Asyiknya Membaca Buku

Cebanyakan orang mengira kalau membaca itu sekadar hiburan semata. Atau paling tidak, untuk belajar dan membuka wawasan. Tidak salah, sih. Tapi bagi pencinta buku, sering kali membaca buku adalah obat. Mengobati hati dari perasaan sedih, kesal, dan kecewa. Menyembuhkan jiwa dari luka-luka di masa lalu.

Karena itulah cara kita, pencinta buku, merayakan hidup.

Buku adalah penyembuh dan pintu pelarian terbaik bagiku. Lewat buku nonfiksi pengembangan diri, aku bisa memberi pengertian pada psikis yang terluka, mengingatkan bahwa semua akan baik-baik saja. Buku adalah hobi, penyembuh, penghibur, dan sumber pengetahuan. Buatku, ketiadaan buku berarti ketiadaan peradaban dan kebudayaan.

- Pramudita Kurnia, guru freelance, Gen Y, Jakarta.

Ketika berusia 12 tahun, aku mengalami kecelakaan yang membuatku tidak bisa duduk dan berjalan dengan benar. Pada masa itu, buku adalah satu-satunya temanku. Setiap perasaan tak pantas hidup mampir, aku mencari buku mengingatkan tentang peran masing-masing orang di dunia. Sekarang usiaku lebih dari 30 tahun. Buku telah membuatku mampu menjalani versi terbaik hidupku saat ini.

- Annisa Fajr, wiraswasta, Gen Y, Jawa Barat.

Membaca buku membuatku merasa makin bahagia dan keren. Sedari kecil aku menikmati kehidupanku di desa. Satu-satunya yang membuatku merasa keren di antara teman lainnya adalah rajin mengunjungi perpustakaan sekolah saat jam istirahat. Membaca buku pun akhirnya mengantarkan aku menjadi seorang penulis ketika dewasa.

Pengalaman itu aku bagikan kala bekerja sebagai terapis.

- Puji Rahayu, penulis dan spa therapist, Gen Y, Jawa Timur.

Buku itu penenang bagiku ketika sedih dan *overthinking*. Kenapa bisa begitu? Karena setiap kali aku membaca buku, aku akan fokus dan berimajinasi tentang isi buku tersebut. Saat itulah proses meditasiku berjalan. Ketika asyik memikirkan isi buku, masalahku yang tadinya membebani pun terlupakan, jadi aku tak merasa sendirian lagi.

- Iffah, pengurus rumah tangga, Gen Y, Jawa Timur.

Membaca itu seperti memahami hidup. Kita hanya bisa menebak-nebak akhirnya tanpa bisa berkuasa atas jalan ceritanya. Kadang dengan membaca kita bisa mengalihkan sedikit emosi yang sedang menguasai diri kita. Aku juga berharap punya pemikiran yang besar dari membaca. Bagiku, membaca adalah sebuah pengharapan agar aku bisa hidup lebih baik kedepannya.

- Riris, mahasiswa, Gen Z, Jawa Barat.

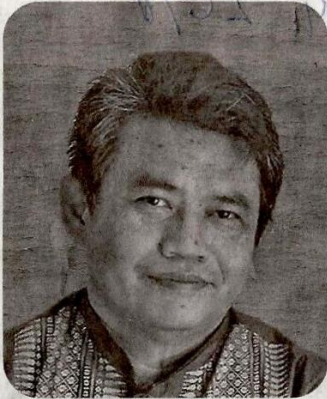
Buku menemaniiku dalam perjalanan ke kantor setiap hari. Di tengah hiruk pikuk lalu lintas Jakarta, keriuhan penumpang yang berdesakan, dan klakson motor yang bersahutan memekakkan telinga, cerita yang kubaca mampu mengalihkan pikiran dan menenangkan suasana hati. Membaca buku mampu membuat perjalanan yang aku tempuh seakan tidak penuh beban.

- Putri Riadini, geolog, Gen Y, Jakarta.

Dulu di kampungku sering mati lampu. Tapi saking asyiknya membaca buku, aku *bela-belain* baca bukunya dengan penerangan senter. Membaca buku membuatku lebih hidup. Membaca buku membuatku merasakan kehidupan lain yang belum tentu akan aku lalui. Membaca juga mengenalkan aku pada dunia menulis. Bagiku, membaca adalah hidup dan menulis adalah bernafas.

- Diny Aprilisyanda, freelance, Gen Z, Sumatera Barat.

Refleksi 79 Tahun Indonesia Merdeka: Pendidikan yang Terlupakan



DOK PRIBADI

MAHYUDIN

Direktur Riset dan Publikasi Yayasan Sukma

SUDAH 79 tahun Indonesia merdeka dengan sumber daya alam yang melimpah dan potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Namun, hingga saat ini kita masih terilit utang dan masih belum mampu menjadi kiblat ekonomi, bahkan di tingkat Asia Tenggara.

Singapura, Thailand, dan bahkan Vietnam yang baru bangkit belakangan telah melampaui kita dalam banyak aspek. Apa yang menjadi penyebabnya? Jawabannya sederhana, tapi mendalam: kita abai pada pendidikan.

Sejak kemerdekaan pada 1945, Indonesia sebenarnya memiliki tiga momentum penting yang seharusnya dapat menjadi landasan kuat untuk membangun bangsa yang lebih maju melalui pendidikan, yaitu Kemerdekaan 1945, Orde Baru dan

melimpahnya minyak, serta reformasi 1998. Namun, sayangnya ketiga momentum tersebut tidak pernah benar-benar difokuskan pada perbaikan pendidikan yang berkelanjutan.

Kemerdekaan 1945

Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, ada kesempatan besar untuk membangun sistem pendidikan yang solid. Namun, fokus awal pemerintah lebih pada mempertahankan kemerdekaan dan stabilitas politik sehingga pendidikan belum menjadi prioritas. Hal itu menyebabkan perkembangan pendidikan lambat dan tidak merata, terutama di daerah tertinggal. Meskipun Presiden Soekarno meluncurkan program pemberantasan buta aksara pada 14 Maret 1948, upaya tersebut terbentur oleh situasi politik dan ekonomi yang tidak stabil.

Orde Baru dan melimpahnya minyak

Pada 1966, awal era Orde Baru memberi Indonesia kesempatan kedua. Penemuan cadangan minyak besar pada 1970-an seharusnya menjadi modal signifikan untuk investasi di sektor pendidikan. Memang ada usaha untuk memajukan pendidikan melalui program wajib belajar enam tahun yang kemudian diperluas menjadi sembilan tahun serta pembangunan Sekolah Dasar Inpres di berbagai daerah. Namun, hasilnya belum sesuai harapan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 menunjukkan bahwa sekitar 28,8% penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas hanya memiliki ijazah SMP sebagai jenjang pendidikan tertinggi. Itu menunjukkan bahwa meskipun ada upaya, pendidikan

Indonesia belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat. Jika pada saat itu pemerintah Orde Baru mengintegrasikan prinsip 'dukungan bagi guru dan siswa' dengan memanfaatkan dana minyak yang melimpah, tidak hanya membangun SD Inpres, sistem pendidikan Indonesia bisa lebih kuat dan inklusif.

Reformasi 1998

Reformasi 1998 membawa harapan baru dengan munculnya era demokrasi. Namun, sekali lagi, momen tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal untuk memperbaiki pendidikan. Pemerintah hasil reformasi lebih banyak berfokus pada urusan politik kekuasaan daripada fokus pada pembangunan bangsa, khususnya di bidang pendidikan.

Kurikulum pendidikan sering berganti, tetapi perubahan tersebut lebih bersifat kosmetik dan tidak menyentuh akar permasalahan yang ada. Menurut catatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sejak reformasi hingga 2023, Indonesia telah mengalami lima kali perubahan kurikulum.

Pada awal reformasi, Kurikulum 1994 masih digunakan, yang dianggap terlalu padat dan berat. Pada 2004, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) diperkenalkan untuk fokus pada pengembangan kompetensi siswa, tetapi pelaksanaannya menemui banyak tantangan.

KBK digantikan oleh Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada 2006, memberikan otonomi lebih besar pada sekolah meski membutuhkan dukungan tambahan. Pada 2013, Kurikulum 2013 (K-13) diperkenalkan, mengintegrasikan pendidikan

karakter dengan mata pelajaran dan memperkenalkan penilaian lebih komprehensif. Namun, pelaksanaannya juga menghadapi revisi dan penundaan. Pada 2021, Kurikulum Merdeka diperkenalkan untuk memberikan fleksibilitas lebih besar serta fokus pada pengembangan kompetensi siswa dan pemanfaatan teknologi.

Ubah sistem pendidikan nasional

Perubahan kurikulum terlihat seperti mencerminkan upaya pemerintah dalam memperbaiki pendidikan di Indonesia, padahal tidak. Karena kurikulum hanya bagian kecil dari tata kelola pendidikan di Indonesia; karena masalah pendidikan di Indonesia bukanlah masalah kurikulum. Masalahnya lebih subsantif dari itu, yaitu sistem pendidikan yang satu.

Dalam sejarah pendidikan Indonesia, Indonesia pernah memiliki UUD Nomor 2 Tahun 1989 yang digantikan UU Sisdiknas 2003 dengan sejumlah perubahan penting. Pertama, penekanan pada akses pendidikan yang merata dan inklusif sesuai dengan panduan UNESCO tentang tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs);

Kedua, kualitas pengajaran dan pembelajaran. Laporan-laporan PISA menyoroti pentingnya kualitas guru, kurikulum yang relevan, dan metode pembelajaran yang efektif untuk mencapai hasil pendidikan yang tinggi (PISA, 2018). Ketiga, penilaian dan evaluasi yang adil. Menurut Binkley *et al* (2012), dalam *Assessment and Teaching of 21st Century Skills (ATC21S)*, pentingnya penilaian berbasis kompetensi dan penilaian yang adil untuk mengukur penguasaan keterampilan abad ke-21.

Keempat, infrastruktur dan sumber daya yang memadai. World Bank menyoroti pentingnya infrastruktur pendidikan yang memadai untuk mencapai hasil belajar yang optimal, terutama di negara berkembang (World Bank, 2018). Kelima, dukungan bagi guru dan siswa.

Keenam, pendidikan karakter dan keterampilan hidup. Ketujuh, keterlibatan

orangtua dan masyarakat. Penelitian yang dilakukan Epstein JL (2011) menunjukkan pentingnya partisipasi orangtua dalam pendidikan anak-anak mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik. Kedelapan, keberlanjutan dan inovasi. Kesembilan, kepemimpinan yang efektif. Terakhir, pendanaan yang cukup dan berkelanjutan.

Apakah 10 prinsip dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sudah diterapkan secara efektif? Bagaimana dengan madrasah yang dikelola secara sentralistik oleh Kementerian Agama? apakah itu termasuk pendidikan atau agama? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah madrasah perlu dikelola secara sentralistik atau desentralistik.

Selain itu, peran orangtua yang kini terbatas pada komite sekolah, yang sering hanya menyetujui laporan keuangan tanpa terlibat dalam perencanaan, juga menjadi perhatian. Sistem bantuan operasional sekolah (BOS) yang ada sekarang menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi sekolah dengan jumlah murid sedikit dan sekolah swasta, termasuk madrasah, serta memicu persaingan antarsekolah untuk mendapatkan lebih banyak siswa demi dana BOS yang lebih besar. Itu hanyalah sebagian dari berbagai masalah pendidikan yang ada, bukan hanya soal kurikulum yang sering berubah.

Kemendikbud-Ristek pernah mengusulkan perubahan UU Sisdiknas, tapi ditolak karena perubahannya tidak substantif. Perubahan lebih mengarahkan pada penggunaan kurikulum yang saat ini sedang dikembangkan dan akan diterapkan secara nasional. Padahal, UU Sisdiknas seharusnya bukan hanya kurikulum. Dia lebih dari itu. Kurikulum hanya tata kelola persekolahan. UU Sisdiknas harus melingkupi sistem pendidikan. 79 tahun merdeka harus jadi momentum untuk memperbaiki pendidikan kita, dimulai dengan mengubah UU Sisdiknas. Merdeka!

Guru Berkualitas dan Sejahtera Kunci Pendidikan Bermutu

JAKARTA, KOMPAS — Pengadaan dan pemerataan guru berkualitas menjadi salah satu isu penting yang menjadi perhatian pemerintah. Keberadaan guru-guru berkualitas dan sejahtera menjadi kunci terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua.

Pelaksana Tugas Direktur Pendidikan Profesi Guru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Ferry Maulana Putra, Selasa (24/12/2024), mengatakan, pemerataan guru masih menjadi tantangan. Hal ini akan dilakukan dengan kebijakan redistribusi guru untuk mengatasi kesenjangan pendidikan yang ada.

Menurut Ferry, terdapat kekhawatiran bahwa banyak guru yang ditempatkan di sejumlah daerah tidak memiliki kualifikasi yang memadai sehingga berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan siswa. "Untuk masalah pemerataan guru, kami memandang perlu adanya penugasan dengan pola redistribusi," ujarnya.

Peningkatan mutu dan profesionalisme bagi 600.000 guru lewat pendidikan profesi guru (PPG) yang sudah ada dalam sistem pendidikan, tetapi belum disertifikasi, akan dipercepat. Undang-Undang Guru dan Dosen terabalkan karena guru yang sudah eksis belum semuanya menjalani PPG untuk mendapatkan sertifikasi. Kuotanya terbatas setiap tahun dan banyak guru belum memenuhi syarat kelulusan D-4/S-1.

Setelah PPG bagi guru selesai dilaksanakan, lanjut Ferry, program PPG prajabatan akan diadakan untuk para calon guru. "Polanya adalah memberikan kesempatan PPG melalui beasiswa selama satu tahun. Mereka akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan daerah. Ini adalah langkah yang akan meringankan semua pihak, termasuk para murid, karena guru yang sudah bersertifikat akan lebih siap dalam menjalankan tugasnya," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mendukung komitmen Kemendikdasmen untuk lebih fokus meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru. Karena itu, pemerataan akses pendidikan, peningkat-

an kualitas tenaga pendidik, serta penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai bagi semua lapisan masyarakat harus dilaksanakan, terutama di daerah-daerah terpencil.

Secara terpisah, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq dalam kunjungan kerja di Pekanbaru, Riau, beberapa waktu lalu menekankan pentingnya memastikan semua anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa memandang latar belakang atau status sekolah mereka. "Tidak ada perbedaan antara sekolah negeri dan sekolah swasta karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Fajar.

Pemerintah, tambahnya, meluncurkan sejumlah program, seperti Program Indonesia Pintar dan beasiswa, untuk menjamin akses pendidikan yang adil dan berkualitas bagi anak-anak Indonesia. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kesejahteraan guru, baik guru aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN.

Menurut Fajar, Kemendikdasmen telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Dalam Negeri agar guru-guru swasta yang telah diangkat menjadi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dapat kembali mengajar di sekolah asalnya. Selain itu, kebijakan baru terkait beban mengajar guru juga telah disiapkan.

Fajar menjelaskan bahwa kewajiban 24 jam mengajar per minggu tidak lagi harus dilakukan sepenuhnya di dalam kelas. Guru dapat memenuhi jam tersebut melalui tugas tambahan, seperti mendampingi siswa atau melakukan kegiatan kemasyarakatan di luar sekolah.

Tuntutan guru swasta

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Moh Fatah meminta pemerintah serius mendukung kesejahteraan dan mutu guru di sekolah-sekolah swasta. PGSI bersama koalisi organisasi profesi guru

memberikan sejumlah rekomendasi terkait skema kebijakan peningkatan kesejahteraan guru-guru swasta (non-ASN) yang telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada puncak Hari Guru Nasional 2024.

Menurut Fatah, guru swasta meminta agar program *inpassing*/penyetaraan bagi guru-guru swasta (non-ASN) dibuka kembali. Ini penting agar kenaikan kesejahteraan guru-guru swasta (non-ASN) melalui tunjangan profesi/sertifikasi berjalan sesuai amanat konstitusi dan Pasal 16 Ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. UU ini menyebutkan, tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) (guru non-ASN) diberikan setara dengan satu kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

Fatah menambahkan, PGSI mendukung kebijakan Presiden untuk memberikan bantuan *cash transfer* kepada guru-guru swasta/non-ASN mulai tahun 2025. "Kami berharap bantuan *cash transfer* diberikan kepada semua guru swasta, baik yang sudah sertifikasi maupun yang belum sertifikasi. Selama ini, guru-guru swasta umumnya memperoleh penghasilan rata-rata di bawah kebutuhan hidup yang layak. Mereka kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pengembangan profesinya, termasuk untuk memenuhi kebutuhan sosial keluarganya," tuturnya.

Bantuan *cash transfer* kepada semua guru swasta diberikan sebesar Rp 2 juta per orang per bulan selama 13 bulan ditambah dengan tunjangan hari raya. "Kami berharap agar guru-guru swasta atau non-ASN mulai dari jenjang lembaga pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, sampai SMA/SMK/MA yang sudah mengajar sedikitnya tiga tahun di sekolah/madrasah swasta dan sudah disertifikasi serta *inpassing* dapat diberikan afirmasi untuk diangkat otomatis sebagai ASN P3K yang ditempatkan pada sekolah asal masing-masing," ujar Fatah. (ELN)

PENGHARGAAN

"Istri Sempurna" Karya Aveus Har Jadi Cerpen Terbaik "Kompas" 2023

JAKARTA, KOMPAS — Cerita pendek "Istri Sempurna" karya Aveus Har terpilih menjadi Cerpen Terbaik *Kompas* 2023 pada Malam Anugerah Cerpen *Kompas*, Jumat (20/12/2024), di Bentara Budaya Jakarta. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi *Kompas* pada dunia sastra.

"Istri Sempurna" berhasil terpilih di antara 49 cerpen yang dimuat di harian *Kompas* dan 104 lainnya di platform Kompas.id. Adapun sepanjang 2023 ada 2.923 cerpen yang masuk ke Redaksi *Kompas*.

Aveus mengatakan, cerpen "Istri Sempurna" adalah kere-sahannya karena kecerdasan buatan sudah masuk ranah pribadi dan dunia pemasaran semakin masif masuk ke ranah keluarga kita. Ketika seseorang tidak siap menghadapi itu, dia berpikir mungkin akan lahir semacam transaksi hanya dengan ucapan.

Dia bercerita, suatu ketika seseorang menerima telepon dari agen asuransi yang menggiringnya untuk berkata "ya". Jika dia mengatakan "ya", maka ia akan menjadi nasabah dan rekeningnya dipotong tiap bulan.

"Bagaimana jika transaksi yang hanya lewat kata-kata itu diucapkan kepada istri, karena kita tahu sering kali suami-su-

ami kalau istrinya minta hanya berkata 'ya', biar urusannya selesai," kata Aveus.

Cerpenis yang tinggal di Pekalongan, Jawa Tengah, ini sehari-hari berdagang mi ayam sembari bereksperimen di Laboratorium Ide dan Cerita (Labita). Cerpen-cerpennya telah dimuat di sejumlah media dan diterbitkan dalam beberapa buku serta memenangi sejumlah lomba nasional.

"Terima kasih, apresiasi ini. Bagi saya, masuk dimuat *Kompas* saja sudah sangat menyenangkan," ucapnya.

Komitmen merawat sastra

Pemimpin Redaksi Harian *Kompas* (Kompas.id) Sutta Dharmasaputra menuturkan, sebagai sastra koran, cerpen-cerpen *Kompas* umumnya beraliran realisme sosial. Beberapa di antaranya realisme magis. Tema-tema yang diangkat beragam, mulai dari persoalan keluarga, isu sosial seperti korupsi, tafsir agama, hingga konsekuensi teknologi digital bagi kehidupan manusia.

"Bagi *Kompas*, ruang sastra sangat penting karena merupakan bagian dari sejarah perjalanan *Kompas* sejak pertama kali terbit hingga sekarang," ujar Sutta.

[Bersambung ke hlm 15 kol 1-2]

"Istri Sempurna"

(Sambungan dari halaman 1)

Perjalanan *Kompas* dalam memberikan ruang bagi sastra, khususnya cerpen, sudah dimulai sejak 4 Februari 1967. Kala itu, *Kompas* menerbitkan ulang cerita yang pernah tayang di majalah *Praba* berjudul "Lajang Saka: Saidjah". Ini merupakan embrio ruang sastra di *Kompas*.

Kehadiran Cerpen Pilihan *Kompas* menjadi wujud komitmen merawat sastra Indonesia. Buku Cerpen Pilihan *Kompas* pertama terbit pada 1992 dengan judul *Kado Istimewa*. Setelah itu, Anugerah Cerpen *Kompas* mulai digelar sampai sekarang.

Menurut Sutta, geliat sastra masih minim apresiasi. Anugerah Cerpen *Kompas* ingin menggugah pengambil kebijakan atau orang yang menghargai sastra. Dia berharap yang dilakukan *Kompas* bisa ditiru dan didukung pihak lain.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengapresiasi harian *Kompas* karena di tengah disrupsi teknologi dan budaya masih mengangkat sastra sebagai salah satu budaya penting untuk disosialisasikan. Sastra memegang peranan penting dalam aspek edukasi masyarakat.

Pertamina sebagai BUMN, kata Fadjar, berkomitmen untuk memberikan energi kepada masyarakat. Sebagai perusahaan yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, Pertamina memerlukan ruang untuk melakukan edukasi dan sosialisasi dan juga menjadi sarana penyampaian informasi terkait energi.

Sastra adalah salah satu metode yang efektif untuk mengupayakan hal-hal tersebut. Melalui tulisan, segala bentuk informasi dapat disampaikan sehingga masyarakat bisa merasakan energi sekaligus mendapatkan pencerahan.

"Melalui Anugerah Cerpen *Kompas*, kami berharap semakin banyak masyarakat yang mencintai sastra sehingga bisa berdampak pada tumbuhnya tingkat literasi masyarakat," katanya.

Suara bulat

Adapun tim juri Cerpen Pilihan *Kompas* terdiri atas awak Redaksi *Kompas*. Mereka adalah Hilmi Faiq (Wakil Kepala Desk Budaya sekaligus ketua tim juri), Andreas Maryoto (Wakil Redaktur Pelaksana), Budi Suwarna (Kepala Desk Budaya), Sarie Febriane (Wakil Kepala Desk Jurnalisme Data dan Investigasi), serta Susy Berindra (Wakil Kepala Desk Regional).

Budi Suwarna, yang juga merangkap Ketua Panitia Anugerah Cerpen *Kompas*, menyampaikan, cerpen-cerpen tersebut dipilih dengan proses kurasi berlapis. Dari 49 cerpen tersebut, juri memilih 20 nomine cerpen terbaik.

Setiap juri mempunyai satu suara untuk menentukan cerpen terbaik. Setelah juri memberikan suara, cerpen-cerpen tersebut kembali diperiksa dari segi estetika, teknik, kekuatan isu, dan kebaruan. Juri kemudian berdiskusi untuk menentukan pemenang tunggal.

"Yang menarik, juri mencapai suara bulat untuk memilih satu cerpen sebagai pemenang," ujar Budi. (TIO)

KURNIA JR

Cerpelis, Kolomnis

Distraksi Bahasa

Minimal ada dua sebab pada sejumlah kasus kata *khidmat* ditulis *hikmat*. Pertama, karena *khidmat* relatif jarang digunakan, sementara *hikmat* sering disebut karena ada dalam sila keempat teks Pancasila walau mungkin banyak orang tak begitu paham apa makna *hikmat* dan "hikmat kebijaksanaan" di situ.

Kedua, kemiripan lafal keduanya membuat orang rentan terdistraksi (bingung, terkecukutan). Maka, ada wartawan yang menulis: "Hikmat, upacara dilaksanakan di halaman kantor sekretariat provinsi".

Kasus yang sama rentan terjadi pula pada kata *melayat* dan *melawat* yang dimaksudkan bertakziah ketika ada kematian. Kebetulan dalam komunitas lokal di daerah tertentu digunakan kata *nyelawat*—mungkin ini dari ungkapan *berselawat*.

Kasus semacam ini kerap terjadi, bahkan di kalangan terdidik seperti wartawan, sedemikian rupa sehingga hampir-hampir dapat kita tengarai ini sejenis dengan ketidakpedulian dalam perilaku sosial kita. Ya, agak mirip dengan kebiasaan apati membuang sampah sembarangan, yang bahkan kelas menengah pun ikut-ikutan: membuang sampah di jalan dari jendela sedan.

Kekacauan (atau pengacauan) terjadi juga pada penyebutan nama jalan, misalnya: *Latumetten* ditulis *Latumenten* di Jakarta Barat. Mana yang benar? Di platform digital keduanya sama-sama eksis. Karena ini menyangkut nama tokoh nasional, pemerintah perlu bersikap tegas meluruskan.

Kasus yang sama terjadi pula di Kota Bogor, yakni pada *Jalan Sumeru*, yang kini lebih kerap disebut *Jalan Semeru*. Kasus ini rasanya agak keterlaluan sebab *Semeru* dalam pengetahuan umum merujuk kepada nama sebuah gunung di Jawa Timur. Padahal, aslinya nama jalan itu didedikasikan untuk menghormati seorang tokoh publik, yakni *dokter Sumeru*.

Seorang senior di dunia jurnalistik bercerita tentang wartawan masa kini di media digital: "Mereka malas riset karena beranggapan kalau ada salah tulis, tinggal direvisi dan diunggah ulang."

Fakta ini terasa ironis sebab media mengandalkan bahasa sebagai perkakas utama, tetapi justru elemen ini disepelekan. Padahal, disiplin bahasa sangat penting pada media sebab mereka berpengaruh besar terhadap publik.

Problem umum lain di era ini ialah perilaku berbahasa remaja di media sosial. Contoh kesalahan masif mereka terutama ketidakmampuan membedakan penerapan imbuhan dengan kata depan, misalnya *di-*, *ke-*, *-an*, yang dipisahkan ketika seharusnya melekat ke pangkalnya dan sebaliknya, misalnya: *disini*, *kesana*, *di pukul*, *juta an*. Masing-masing seharusnya ditulis *di sini*, *ke sana*, *dipukul*, *jutaan*.

Lucunya, ada seorang remaja dalam suatu klub budaya pop yang awalnya berbahasa sesuai dengan kaidah yang benar malah kemudian ikut-ikutan teman-temannya menulis *disini*, *di pukul*, dan seterusnya. Kita hanya dapat menduga dia ikut arus dominan yang salah hanya demi pengakuan sosial di dalam klub tersebut, sekalipun caranya keliru.

Di media sosial ada fenomena yang kita sebut viral. Apa pun yang viral hampir selalu jadi pusat perhatian. Tak jarang, celoteh remaja yang jadi pangkal viral lalu diikuti orang-orang lajah lantaran kesan "segar" belaka. Apalagi budaya pop "dikomandoi" oleh level usia yang kepribadiannya masih labil ini.

Gaya berbahasa mereka yang melanggar kaidah pun ditiru oleh kalangan usia matang, dari khalayak umum, selebritas, perunduk (*influencer*), hingga politikus. Lambat laun terjadi distraksi perihal mana yang pantas dijadikan rujukan perilaku sosial.

Distraksi sosial berawal dari distraksi pikiran sebagai dampak distraksi logika berbahasa yang dilembagakan.

Cegah Ketimpangan Akses Pendidikan Unggul

SMA Unggulan Garuda semestinya terbuka dan tidak hanya dapat diakses oleh siswa dari kelompok sosial tertentu yang akan menimbulkan ketimpangan akses pendidikan.

DESPIAN NURHIDAYAT
despian@mediaindonesia.com

PEMERINTAH menyampaikan usulan pada DPR untuk membangun SMA unggulan yang disebut SMA unggulan garuda. Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan bahwa usulan tersebut sudah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR sejak

Desember 2024. Program itu dikatakan memiliki tujuan yang cukup baik. Hetifah juga berpesan agar program itu terbuka dan tidak hanya dapat diakses oleh siswa dari kelompok sosial tertentu yang akan menimbulkan ketimpangan akses pendidikan.

“Tujuan SMA unggulan garuda adalah mencetak generasi muda yang unggul secara akademik, memiliki karakter

kuat, dan berdaya saing global sambil tetap berakar pada nilai-nilai budaya lokal dan nasional. Untuk mencapai hal ini, perlu investasi khusus untuk siswa-siswa berpotensi tinggi, berprestasi, dari latar belakang ekonomi rendah/menengah dari seantero Nusantara,” ungkapnya kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Lebih lanjut, menurutnya pembangunan SMA unggulan garuda ialah strategi mengatasi kemiskinan sains dan teknologi dengan target diterima di 100 universitas terbaik dunia. SMA tersebut dirancang untuk fokus pada pendidikan berbasis riset dan inovasi sehingga ditangani langsung oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan

Teknologi.

“Persebaran SMA unggulan garuda, baik yang baru maupun transformasi, dirancang untuk saling melengkapi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Gurunya pun disiapkan melalui program pelatihan guru di SMA unggulan garuda transformasi,” tegas Hetifah.

Menurutnya, SMA tersebut dapat menjadi sarana akselerasi pendidikan.

Akselerasi pendidikan penting untuk meningkatkan daya saing global, mendorong inovasi, mengurangi ketimpangan, menjawab tantangan masa depan, dan mengoptimalkan bonus demografi. Akselerasi pendidikan ialah fondasi utama

untuk transformasi Indonesia menjadi negara maju yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kami juga memberikan masukan pada Kemendikti-Saintek jangan sampai program ini hanya dapat diakses oleh siswa dari kelompok sosial tertentu, misalnya, siswa yang sudah berprestasi atau dari keluarga mampu, sehingga menimbulkan ketimpangan akses pendidikan. Sekolah unggulan dapat mengalihkan perhatian dan sumber daya dari sekolah-sekolah biasa, memperburuk kesenjangan mutu pendidikan,” jelasnya.

Pemerataan mutu sekolah

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan

Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengatakan bahwa keberadaan SMA unggulan garuda berpotensi menciptakan kesenjangan baru. Pasalnya, ketika ada sekolah unggulan, ada stigma bahwa sekolah lain yang tidak unggulan bukan sekolah yang bagus.

“Kalau bukan unggulan, berarti sekolah ecek-ecek alias enggak bermutu. Ini buruk, lo, membedakan anak bangsa untuk memperoleh kesempatan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan,” ungkapnya kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Ubaid juga menyoroti SMA unggulan garuda yang justru berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, bukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Soal di bawah kementerian apa, ini juga membingungkan. Padahal, kan, di jenjang menengah, mengapa tidak di bawah Kemendikdasmen,” ujar Ubaid.

Hal yang paling penting, menurutnya, saat ini kebutuhan sekolah di Indonesia

ialah mutu sekolah dapat merata di mana pun berada. “Ini tugas utama yang mesti dituntaskan, bukan malah bikin kesenjangan baru yang kian membeda-bedakan anak bangsa,” jelasnya.

Sebelumnya, dalam taklimat media di Kemendikti-Saintek, Jakarta, Jumat (3/1), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti-Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menyampaikan program SMA unggulan garuda akan mulai berjalan pada tahun ini. Pada 2025, pemerintah setidaknya akan mulai membangun empat sekolah unggulan baru dan meningkatkan empat SMA terpilih untuk jadi SMA unggulan. “SMA unggulan mulai tahun ini akan dimulai untuk merancang dan membangun di empat lokasi untuk yang baru. Di antara empat itu, yang sudah pasti di NTT, Babel, Sulawesi Utara. Pembangunan mungkin butuh waktu dua tahun. Untuk yang di-upgrade, kita sudah pilih empat SMA unggulan,” papar Satryo. (Ifa/H-2)

Menimbang Urgensi Kembalinya Ujian Nasional

Rencana pemberlakuan kembali ujian nasional dengan versi baru mesti dipikirkan matang dan berorientasi pada peserta didik.

Rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memperlakukan kembali ujian nasional dengan beberapa perubahan mulai tahun 2026 harus dipertimbangkan secara matang. Sejumlah pihak mengusulkan agar keputusan yang dihasilkan berorientasi pada kemajuan pendidikan peserta didik.

Pemerhati pendidikan dari Perguruan Tamansiswa, Darmaningtyas, yang terlibat dalam beberapa diskusi evaluasi kebijakan pendidikan yang digelar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berpendapat, ujian nasional (UN) dinilai perlu diadakan kembali sebagai standar penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada jalur prestasi.

Asesmen nasional (AN) dirasa tidak bisa menjadi pedoman tolak ukur prestasi karena didapat melalui sampling, bukan nilai individu. Ukuran nilai individu selama ini hanya melalui nilai rapor, sementara bobot nilai sangat beragam di setiap sekolah.

Dalam praktiknya, ada guru yang "pelit" memberikan nilai, tetapi banyak pula guru yang "mengobral" nilai agar lulusannya banyak diterima di sekolah-sekolah negeri favorit. Sementara itu, prestasi non-akademik dasarnya hanya sertifikat lomba yang bisa dimanipulasi.

"Karena standar jalur prestasi ini tidak jelas, maka diperlukan adanya standardisasi prestasi," kata Darmaningtyas saat dihubungi, Kamis (2/1/2025).

Pilihan yang muncul antara lain UN diadakan kembali, tetapi bukan sebagai penentu kelulusan atau AN diperluas menjadi sensus. Namun, keduanya sudah dipastikan akan menimbulkan kontroversi di masyarakat.

UN jika masih diterapkan dengan model lama, yakni sebagai penentu kelulusan, tentu akan mengorbankan peserta didik dan keluarganya. Tidak hanya mental yang tertekan, tetapi perekonomian keluarga juga terpengaruh karena anak menjadi terpacu untuk menambah bimbingan belajar di luar sekolah demi mengejar target lulus UN.

Sementara itu, AN dengan sampling seperti yang berjalan lebih kurang tiga tahun terakhir ini tidak dapat menggambarkan nilai individu peserta didik, tetapi lebih pada institusi sekolahnya.

Oleh karena itu, sejumlah pihak menyarankan penerapan Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah (ASPD). Ini sudah diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebab, ASPD ini bersifat lokal dan dapat disesuaikan dengan

kondisi setiap daerah.

Walau lokal, ukuran ini dinilai cukup representatif sebagai standardisasi prestasi di tingkat daerah sesuai dengan tingkatannya.

"Terlepas dari pilihan apa yang akan diambil oleh pemerintah nanti, yang pasti kita memang memerlukan standardisasi pendidikan nasional," ujarnya.

Fokus masalah dasar

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan Guru (P2G) Satriwan Salim menambahkan, Kemendikdasmen sebaiknya fokus pada masalah dasar pendidikan. Persoalan tersebut meliputi rendahnya literasi, numerasi, dan sains anak-anak Indonesia. Skor Programme for International Student Assessment (PISA) menunjukkan kondisi pendidikan Indonesia tak baik-baik saja.

Nilai literasi turun dari 397 pada 2015 menjadi 359 di tahun 2022, numerasi turun dari 386 menjadi 366, sedangkan sains turun dari 403 menjadi 383 pada periode yang sama.

"Yang semestinya diperkuat adalah keterampilan dasar ini. Kalau menghidupkan ujian nasional, apalagi kalau ujian nasional yang seperti pola-pola lama sebagai penentu kelulusan, ini sangat berisiko tinggi," kata Satriwan.

Dihubungi terpisah, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sja-

ifudian mengatakan, pihaknya belum menerima penjelasan lengkap dari Mendikdasmen Abdul Mu'ti terkait rencana ini. Dia berharap, setelah masa reses berakhir, kebijakan baru ini disepakati bersama dengan wakil rakyat di parlemen sebelum ditetapkan.

Hetifah menegaskan, AN memiliki tujuan yang sama dengan UN, yakni untuk memajukan pendidikan. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Pemerintah dan DPR perlu menimbang keputusan yang terbaik untuk peserta didik.

"Harus ada kajian mendalam terkait wacana penerapan kembali UN. Kalau perlu ada kan uji coba sebelum penerapan kembali UN agar kendala lama tidak muncul kembali," katanya.

AN diselenggarakan untuk mengevaluasi kualitas pendidikan di sekolah melalui pengukuran literasi membaca, numerasi, dan survei karakter. Tujuannya, memberikan gambaran komprehensif tentang mutu pembelajaran, bukan untuk menentukan kelulusan siswa.

Sementara itu, UN diselenggarakan dengan tujuan utama untuk mengevaluasi pencapaian kompetensi siswa secara nasional sebagai alat pemetaan mutu pendidikan di daerah dan sebagai standar penilaian kelulusan serta seleksi untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. (TIO)

Kehadiran Perguruan Tinggi Harus Berdampak

JAKARTA, KOMPAS — Pendidikan tinggi harus berdampak pada pembangunan nasional dengan memaksimalkan potensi ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Namun, sivitas akademika belum maksimal berkarya dan berkolaborasi dengan industri ataupun pemerintah daerah untuk memecahkan masalah di masyarakat.

"Kampus belum maksimal berproses atau berkarya. Mahasiswa juga belum maksimal belajar. Hal ini disebabkan masih banyak hambatan regulasi. Padahal, perguruan tinggi itu entitas yang otonominya tinggi. Karena itulah, pemerintah ingin memastikan investasi pendidikan dan industri harus jalan sama-sama dan dibangun secara baik supaya kehadiran perguruan tinggi memberikan dampak baik bagi pembangunan ekonomi," kata Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro dalam acara Taklimat Media 2025: Arah dan Kebijakan Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Jumat (3/1/2025), di Jakarta.

Menurut Satryo, Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak produktif. Indonesia masih termasuk dalam negara berpendapatan menengah karena peningkatan ekonominya bukan akibat produksi, melainkan konsumsi.

"Ini harus diubah dengan mendorong industri bernilai tambah tinggi dan basisnya pengembangan sains dan teknologi. Tujuannya supaya bisa bersaing di tingkat global. Untuk itu, perlu sumber daya manusia dan talenta mumpuni serta hasil riset dan pengembangan yang dapat menjadi industri *start up* atau industri *hitech* lainnya sehingga pada 2029 Indonesia sudah bisa punya industri yang signifikan," ucap Satryo.

Oleh karena itu, potensi Indonesia yang besar, termasuk jumlah penduduknya yang besar, dapat dimanfaatkan untuk mendorong tumbuhnya industri dalam negeri. Salah satunya, mobil listrik nasional. "Kalau mau dikomersialkan, harus ada afirmasi dari APBN untuk dapat bersaing. Misalnya, wajib beli mobil listrik nasional untuk mobil dinas kementerian hingga pemerintah daerah," ujarnya.

Satryo ingin memastikan bahwa Kemendikisaintek mampu menjadikan pendidikan tinggi sebagai agen pembangunan ekonomi supaya pendidikan tinggi mampu memberikan dampak yang lebih baik bagi masyarakat. Untuk itu, Kemendikisaintek berperan dalam mencapai swasembada pangan, energi, air, penguatan pendidikan, sains dan teknolo-

Riset lokal di daerah perlu dikembangkan karena akan membawa pertumbuhan ekonomi lokal.

Stella Christie

gi, serta digitalisasi. Selain itu, juga memperkuat kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.

"Kemendikisaintek juga berperan dalam pelestarian lingkungan hidup serta melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam dan maritim," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Diktisaintek Fauzan menegaskan, program-program yang telah disusun Kemendikisaintek sangat mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Karena itu, struktur kementerian perlu disesuaikan, mulai dari staf, sumber daya, hingga lainnya, dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja.

"Kebermanfaatan ke masyarakat dalam rangka mendukung Astacita Pak Presiden ini menjadi salah satu prioritas yang menjadi atensi, menjadi perhatian bagi perguruan tinggi," ujar Fauzan.

Wakil Menteri Diktisaintek Stella Christie memaparkan, Kemendikisaintek bertugas untuk membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan sains dan teknologi. Sebab, Indonesia memiliki potensi individu yang tersebar di berbagai perguruan tinggi yang sangat mumpuni.

"Kita mempunyai ilmuwan-ilmuwan yang sangat mumpuni, yang sangat pakar pada bidangnya. Saya sudah beruntung bertemu dengan banyak ilmuwan tersebut dan inilah yang perlu kita bangun, yaitu bagaimana kita bisa membangun kondisi yang mendukung pertumbuhan setiap individu tersebut di tiap-tiap perguruan tinggi yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia," kata Stella.

Menurut Stella, penting untuk mendorong perguruan tinggi di daerah dengan keunikan masing-masing, membuat ekosistem yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. "Jadi, riset lokal di daerah perlu dikembangkan karena akan membawa pertumbuhan ekonomi lokal. Dampak ini bisa terjadi kalau kita pentingkan ekosistem yang mendukung riset di lokal. Ada korelasi jelas antara kualitas riset dan saintek di perguruan tinggi dengan ekonomi di daerah," tuturnya.

2026, Ujian Nasional Akan Diberlakukan Kembali

Ujian nasional yang ditiadakan sejak 2021 kemungkinan akan diterapkan kembali dengan sistem yang berbeda pada 2026 atau tahun ajaran 2025/2026.

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah selesai mengevaluasi sejumlah kebijakan pendidikan yang sudah dijalankan pemerintahan sebelumnya. Beberapa kebijakan, seperti ujian nasional, diwacanakan akan digelar kembali pada 2026.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan, rencana mengadakan kembali ujian nasional akan dimatangkan sebelum diumumkan lebih lanjut. Ujian nasional yang ditiadakan sejak 2021 tersebut kemungkinan akan diterapkan kembali dengan sistem berbeda pada 2026 atau tahun ajaran 2025/2026.

"Nanti pada akhirnya kami akan memiliki, ini saya buka saja ya, memiliki sistem evaluasi baru yang akan berbeda

dengan sebelumnya. Nah, sistem evaluasi baru yang berbeda itu seperti apa, tunggu sampai kami umumkan," kata Abdul Mu'ti saat taklimat media, di Kemendikdasmen, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Dia menyatakan sudah menampung aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan pendidikan terkait dengan hal ini. Salah satunya aspirasi dari kalangan perguruan tinggi yang merasa butuh capaian akademik secara individu pada calon mahasiswa mereka, bukan asesmen nasional yang diambil dari sampling.

"Misalnya, waktu kami bertemu dengan tim seleksi nasional masuk perguruan tinggi, mereka memerlukan hasil belajar yang sifatnya individual," ucapnya.

Namun, dia menegaskan, pi-

haknya belum memutuskan kebijakan apa pun. Kemendikdasmen masih menggunakan dua kurikulum, yakni Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka, serta masih menerapkan asesmen nasional.

Masalah dasar pendidikan

Saat dihubungi secara terpisah, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan Guru (P2G) Satriwan Salim menilai, ujian nasional sebagai penentu kelulusan tidak lagi relevan untuk diberlakukan kembali pada zaman sekarang. Kemendikdasmen sebaiknya fokus pada masalah dasar pendidikan.

Persoalan itu adalah rendahnya literasi, numerasi, dan sains anak-anak Indonesia. Skor Programme for International Student Assessment (PISA) menunjukkan kondisi pen-

didikan Indonesia tidak baik-baik saja.

Nilai literasi turun dari 397 pada 2015 menjadi 359 tahun 2022; numerasi turun dari 386 menjadi 366; sedangkan sains turun dari 403 menjadi 383 pada periode yang sama.

"Yang semestinya diperkuat ialah keterampilan dasar ini. Kalau menghidupkan ujian nasional, apalagi kalau ujian nasional yang seperti pola-pola lama, yaitu penentu kelulusan, ini sangat berisiko tinggi," kata Satriwan.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Anita Lie menilai, evaluasi efektif sistem pendidikan melibatkan analisis multidimensi. Analisisnya perlu berfokus pada hasil belajar siswa, kurikulum, mutu

guru, lingkungan belajar, kepemimpinan, pembiayaan, akuntabilitas, pemerataan, dan inovasi.

Dia berharap Kemendikdasmen tidak melangkah mundur kembali ke pemberlakuan ujian nasional. Sebab, belum ada jaminan terkait dengan integritas pelaksanaan ujian nasional serta pemerataan akses dan kualitas pendidikan semua daerah bisa dipenuhi.

"Kemudaran ujian nasional bukan terletak pada ketidaksempurnaan instrumennya sendiri. Itu masih bisa diperbaiki dan disempurnakan. Daya rusak ujian nasional yang paling utama terletak pada ketidaksesuaian antara rasional dan administrasi ujian nasional dengan tujuan pendidikan dan situasi pendidikan di Indonesia," kata Anita. (TIO)

Menteri Mu'ti Ungkap Sistem Baru Evaluasi Belajar

MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengakui Kemendikdasmen telah menuntaskan kajian pemberlakuan sistem baru evaluasi belajar yang akan diumumkan sebelum tahun ajaran 2025/2026.

"Ini saya buka saja ya. Tetap akan ada yang namanya evaluasi yang berbeda dengan sebelumnya. Apa yang berbeda dari sistem evaluasi baru itu, bentuknya seperti apa, dan apa namanya, tunggu saja pengumuman resmi, tapi kajian kami menyangkut ini sudah selesai," kata dia di Jakarta, Selasa (31/12).

Yang jelas, kata dia, penyelenggara ujian ialah satuan pendidikan terakreditasi. Karena itu, yang tidak terakreditasi tidak bisa menjadi penyelenggara.

Jika belajar dari pengalaman, paparnya, Indonesia sudah pernah menjalani beragam sistem evaluasi. Bentuknya berbeda, mulai ujian penghabisan, evaluasi belajar

tahap akhir nasional (ebtanas), ujian nasional, hingga ujian sekolah berstandar nasional (USBN).

Selain itu, lanjutnya, ada asesmen nasional (AN) yang berbasis komputer dengan format *sampling* dan tidak menjadi penentu kelulusan. Hanya saja, imbuhnya, banyak yang menilai AN belum memadai mengingat sifatnya yang berupa *sampling*.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dudung Abdul Qodir menyetujui rencana penerapan evaluasi hasil belajar siswa seperti UN. Namun, ia menggarisbawahi itu dilaksanakan untuk melaksanakan pemetaan kualitas pendidikan dan bukan menjadi satu-satunya syarat kelulusan.

Dudung memaparkan kajian PGRI yang melihat UN dapat memotret tiga hal. Pertama ialah memotret kompetensi peserta didik secara akademis, kedua kompetensi nonakademis siswa, dan ketiga pengembangan karakter siswa.

Rencana Pemberlakuan kembali Ujian Nasional

- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyebut kajian konsep baru ujian nasional (UN) sudah selesai dilakukan.
- UN akan diterapkan dengan versi baru pada tahun ajaran 2025/2026.
- Pengumuman pelaksanaan akan disampaikan sebelum tahun ajaran 2025/2026 dimulai.

Karakter ujian nasional yang sebelumnya pernah berlaku

- Menguji beberapa mata pelajaran.
- Dilaksanakan pada akhir jenjang satuan pendidikan.
- Digunakan sebagai pertimbangan masuk ke jenjang pendidikan berikutnya.
- Berstandar nasional.
- Wajib diikuti semua murid.

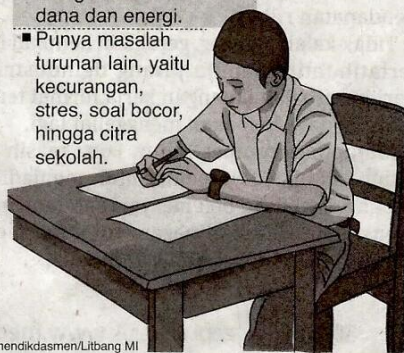
Pro-kontra adanya ujian nasional

Pro

- UN dipandang sebagai salah satu cara meningkatkan motivasi belajar siswa.
- UN merupakan salah satu upaya peningkatan standar pendidikan Indonesia.
- Tanpa UN, adanya penurunan nilai ijazah sekolah Indonesia di mata internasional.

Kontra

- Menghabiskan dana dan energi.
- Punya masalah turunan lain, yaitu kecurangan, stres, soal bocor, hingga citra sekolah.



Sumber: Kemendikdasmen/Litbang MI

Ia menjelaskan PGRI berharap ada transformasi pelaksanaan UN mulai tahapan pembuatan soal, tata kelola, hingga manajemen.

Harapannya, imbuhnya, UN dapat memotret kualitas siswa, kualitas sekolah, dan pemetaan untuk pemerintah

daerah.

"Format ini yang harus dikaji sehingga menghasilkan UN yang *effortless action* dan *result*. Artinya UN membangun kesadaran moral dalam meraih prestasi dengan cara-cara yang membahagiakan," kata Dudung. (Ifa/X-7)

Sastra untuk Semua, dari Penjual Mi Ayam sampai Komisaris

Sastra tak mengenal kelas sosial dan tidak hanya digeluti para pujangga. Mulai tukang kopi, penjual mi, penjahit, komisaris perusahaan, sampai dokter menulis cerpen dan puisi. Di balik semangat berkarya itu, terselip ironi tentang mereka yang tak bisa selalu menyalurkan hidupnya pada sastra.

DWI BAYU RADIUS DAN WISNU DEWABRATA

Sajak-sajak Leon Agusta menyusuri sudut-sudut kedai di Serua, Depok, Jawa Barat. Sekitar 10 peminat sastra asyik mendeklamasikan lembar-lembar puisi penyair asal Sumatera Barat tersebut. Temaram lampu LED menorehkan nuansa yang dramatis.

Si empunya hajatan, Mahwi Air Tawar (41), menggiling kopi dengan *grinder* dan menyeduhkannya dengan mesin. Sekejap saja, ia sudah menyajikan kopi arabika jawa, *robusta lactic*, atau

kopi paduan kolombia, brasil, sumatera, dan guatemala. Lebih kurang 10 orang duduk melingkar.

Keguyuban, kopi, dan camilan berkelindan. Kehangatan tiga elemen itu melingkupi mereka yang menatap lekat-lekat deretan karya Leon yang berjudul penyair berwajah sayu. Bakwan, tempe, tahu, singkong, dan martabak panas diraih jari-jari diselingi dengan menyempap kopi yang disajikan Mahwi.

Puisi-puisi lantas meluncur, seperti "Gendang Pengembara", "Dalam Kabut Hitam", "Soneta Perpisahan", dan "Nyanyikanlah Sebuah Lagu, Harvey". Nyamuk-nyamuk nakal yang ganas mengisap darah, bising knalpot sember, sampai erangan kucing kebetel kawin tak mengusik kekhidmatan mereka.

Malam semakin larut. Mahwi yang sebenarnya sedang demam dan sakit gigi mengenakan jaket tebal dan *sarungan*, tetapi tetap setia menemani sahabat-sahabatnya. Tak ayal pula saat bincang-bincang akhirnya

>> BACA JUGA:

Bara Api Komitmen

GAYA HIDUP/HLM 7

usai menjelang tengah malam, ia sudah setengah teler sampai rebahan di sofa.

Kopi memang sudah amat lekat dengan Mahwi. Ia membuka Adakopi Original yang menaungi sobat-sobatnyanya tadi. Kedai itu sebenarnya sedang direnovasi sejak sebulan lalu yang direncanakan selesai pada Januari 2025. Pemugaran nyatanya tak lantas mengurungkan geliat bersastra.

"Saya menyeimbangkan sastra dan meracik kopi dengan tetap membaca kalau senggang waktu berjualan. Pas ide datang, saya segera catat," ujarnya, Kamis (26/12/2024). Tak heran, kertas dan pena tak boleh luput dari jangkauan tangan Mahwi.

(Bersambung ke hlm 15 kol 1-7)



KOMPAS/MOHAMMAD HILMI FAIQ

Peserta Workshop Cerpen *Kompas* mencari bahan tulisan di Pasar Tradisional Padang Panjang, Senin, 11 Mei 2015. Semangat para peserta *workshop* ini ibarat nyala api yang bakal memberi terang pada masa depan dunia sastra. Kelas ini digelar sebagai wujud komitmen *Kompas* terhadap sastra.

Sastra untuk Semua, dari Penjual Mi Ayam sampai Komisaris

(Sambungan dari halaman 1)

Seusai terjaga saat subuh, ia menulis cerpen, novel, atau sajak. "Pikiran masih *fresh* (segar). Menulis dan membaca jadi yang utama. Sore sampai tengah malam, baru kedai buka," ucapnya.

Kerap bermuatan lokalitas Madura, lima cerpen Mahwi dimuat *Kompas*, belum termasuk sembilan puisi. Ia menorehkan karyanya pula, "Toya", dalam buku *Cerpen Pilihan Kompas* 2021.

Demikian pula Suharso (47), sastrawan dengan nama pena Aveus Har. Ia menjual mi ayam dengan gerobak di depan rumah, tetapi kepiawaian merangkai kata-kata telah mengantarnya untuk menyabet piala dalam Anugerah Cerpen *Kompas* pada 20 Desember 2024.

Kreasi warga Pekalongan, Jawa Tengah, yang berjudul "Istri Sempurna" itu dinobatkan sebagai Cerpen Terbaik *Kompas* 2023. Ia menyuguhkan keunggulannya menuangkan kekritis-an terhadap teknologi digital yang sudah sedemikian rupa

memerangkap manusia.

"Aku sudah lama baca, bahkan memendam keresahan tentang ginoid dan AI (*artificial intelligence* atau akal imitasi) yang sudah mengerjakan banyak tugas manusia," ucapnya. Ia juga aktif mengelola komunitas Laboratorium Ide dan Cerita setidaknya sejak satu dekade silam.

Har melayani para pembeli yang bersantap sambil lesehan di beberapa meja. Ia sudah gemar berburu bacaan sejak kecil. "Memang, pengin tahu saja sampai koran bekas buat bungkus makanan kubaca. Kalau jualan, sudah dari bujangan," ucapnya.

Munawaroh (39), cerpenis asal Madura, juga sering menjahit seraya pikirannya mengembara untuk menggapai inspirasi. Penulis dengan nama pena Muna Masyari tersebut merampungkan "Kasur Tanah" yang terpilih sebagai Cerpen Terbaik *Kompas* 2017.

"Enggak cuma menyusun kalimat, tetapi saya, kan, harus mengandalkan rasa. Kalau memilih kata-kata tertentu, misalnya, pas dibaca jadi enak be-

tul," ujarnya sambil tersenyum. Muna menyeleksi kalimat-kalimat sejoli mungkin dengan menghayatinya.

Ia bisa menuntaskan hingga tiga pakaian sehari meski mengaku kedodoran menulis juga jika garapannya sebanyak itu lantaran tak punya karyawan. Soal ongkos menjahit, Muna tak memerinci, tetapi hanya mengungkapkan besaran yang tergantung bahan dan model bajunya.

"Kalau paling ramai, setiap Rajab, Syakban, dan Ramadhan. Memang, enggak pakai bulan-bulan Masehi. Kalau Ramadhan, contohnya, banyak pesanan buat Lebaran," ucapnya. Sementara selama Syakban dan Rajab dipadati dengan permintaan membuat seragam madrasah.

Mengalihkan sakit

Dunia sastra jelas turut diisi mereka yang lumrah-lumrah saja jika disebut kalangan mapan. Contohnya, Sasti Gotama dan Iggi H Achsien yang sama-sama bersastra dengan jalan mengalir begitu saja tanpa direncanakan dengan saksama.

Pada permulaannya, Sasti, seorang dokter umum yang tak lagi berpraktik, senang menumpahkan pikiran dan unek-uneknya dalam bentuk tulisan di media sosial. Ada satu dan lain hal yang membuat kondisi kesehatan Sasti menyulitkan dirinya, terutama untuk beraktivitas. Tubuh Sasti pun sering merasakan nyeri.

"Saya lebih banyak menulis sebagai bentuk katarsis. Hal itu (terutama) saya lakukan terkait upaya mengatasi masalah. Bisa jadi, nyeri itu dipengaruhi pikiran yang kurang terbebas-kan," ujarnya.

Ia mengalihkan sakitnya dengan banyak menulis yang terbilang efektif. Membaca karyanya, beberapa kenalan daring menyarankan Sasti untuk mengirim tulisan-tulisan tadi ke media massa, terutama harian *Kompas*. Sejak tahun 2019, menulis sudah menjadi semacam profesi baru Sasti.

Beberapa karya Sasti bahkan mendapat penghargaan. Paling baru, ia dinyatakan sebagai pemenang kedua Sayembara Naskah Teater Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) 2024. Pada 5

November 2024, ia juga mendapat Anugerah Sabda Budaya kategori Sastra. Masih di tahun yang sama, Sasti menerbitkan kumpulan cerpen terbarunya, *Akhir Sang Gajah di Bukit Kupu-kupu*, dan novel *Ingatan Ikan-Ikan*.

Novel *Rahim* juga masuk kategori Naskah Menarik Minat Dewan Juri Sayembara Novel DKJ 2023. Pada 2022, Sasti dinobatkan menjadi salah satu dari 10 Emerging Writer Ubud Writers and Readers Festival (UWRF) 2022. Pada tahun yang sama, ia dinyatakan sebagai juara pertama Hadiah Sastra "Rasa" 2022.

Apa yang ia lakukan seolah mengalir saja. Hal itu juga yang membuat ia mencoba penulisan naskah teater dan menerjemahkan buku. "Karya saya masuk Cerpen Pilihan *Kompas*, lalu karya-karya saya diterbitkan dalam bentuk antologi yang jadi pilihan *Tempo*," ujarnya.

Adapun Iggi sudah gemar membaca karya sastra sejak masih SMA dan kuliah. Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang juga Komisaris Independen Pertamina

itu mengenal sejumlah penulis sastra terkenal sejak usia muda. Iggi sempat ragu mengirimkan cerpen "Kayu Nisan Terakhir" ke *Kompas*. Namun, setelah berkonsultasi dengan rekannya, ia akhirnya percaya diri.

Megap-megap

Dosen Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Pamulang, Angin Kamajaya, memandang wajar bila sastrawan juga menekuni macam-macam profesi. Penulis cerpen atau puisi mengambil pekerjaan lain sambil menunggu pemuatan karyanya.

"Buat menyambung hidup dengan mendapatkan honor. Bisa juga profesi lain, tetapi masih sempat membuat karya sastra. Artinya, sastra memang untuk semua kalangan," tuturnya. Dunia sastra begitu luas hingga mampu menyentuh berbagai profesi, tetapi Angin tak menampik keironisan para pekerjanya.

Banyak dari mereka belum bisa bergantung sepenuhnya kepada karya sastra untuk mencukupi berbagai kebutuhan. Indonesia sarat dengan sastrawan

hebat, tetapi sebagian praktisi-nya masih megap-megap. Angin mengamati maraknya media digital saat ini sebagai salah satu jalan keluar.

Platform untuk mengirim karya sastra dan menggelar penggemar setianya sudah sangat bervariasi. Media digital memang bisa menjadi solusi, tetapi tantangannya tentu sangat besar karena bagai dunia tanpa batas, siapa pun boleh mengunggah tulisannya.

Persaingan yang sungguh ketat pun tak terelakkan sehingga sastrawan harus beriktikad sekreatif mungkin untuk merebut perhatian pembaca. "Media digital juga bisa menjalin koneksi untuk menjangkau pasar yang baru. Sejumlah sastrawan malah terkenal di daerah lain lalu diundang untuk datang," katanya.

Meskipun demikian, sastra adalah dunia yang terbuka bagi siapa saja. Oleh karena terbuka, sastra bisa jadi tempat pergi atau pulang bagi mereka yang membutuhkan suaka. Mahwi dan Sasti telah membuktikan sastra sebagai tempat teduh dan bahkan menyembuhkan.